

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan
Implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kewajiban Guna
Meraih Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

**YUSNAWATI
NIM 09.16.2. 0077**

IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
2014**

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
(Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan
Implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kewajiban Guna
Meraih Gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I.) pada
Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

Oleh,

YUSNAWATI

NIM 09.16.2. 0077

Dibimbing Oleh:

1. Dr. Abdul Pirol, M.Ag.
2. Firman, S.Pd., M.Pd.

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM JURUSAN TARBİYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PALOPO
2014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul ***“NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”***, yang ditulis oleh Yusnawati, NIM 09.16.2.0077, Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2014., bertepatan dengan tanggal 14 Sya’ban 1435 H., telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I).

12 Juni 2014 M
Palopo, _____
14 Sya’ban 1435 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Prof. Dr. H. Nihaya M, M. Hum. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Sukirman Nurdjan, S.S., M. Pd. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. H. Fahmi Damang, MA. | Penguji I | (.....) |
| 4. Drs. Nurdin K, M.Pd. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Firman, S.Pd., M. Pd. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

Ketua STAIN Palopo

Ketua Jurusan Tarbiyah

Prof. Dr. H. Nihaya M, M. Hum.
NIP 19511231 198003 1 012

Drs. Hasri, M.A.
NIP 19521231 198003 1 036

ABSTRAK

Yusnawati, 2014 “NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu)”. Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Pembimbing
(I) Dr. Abdul Pirol, M.Ag.,
(II) Firman, S.Pd., M. Pd.

Kata Kunci: Nilai-nilai, Pendidikan Antikorupsi, SDN 468 Bilante.

Pokok pembahasan skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu., 2) Bagaimana Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Antikorupsi dan implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kuantitatif yang menganalisis data secara mendalam berdasarkan angka/persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penanaman nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI, meliputi: *Pertama*: Pembelajaran kelas, *Kedua*, Keteladanan *Ketiga*, Kejujuran. *Keempat*, Kesadaran. Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai anti korupsi melalui kantin kejujuran adalah: *Pertama*, Pelaksana atau Guru. Proses pembelajaran akhlak di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu yang hanya dilakukan oleh guru agama berlangsung kurang maksimal. *Kedua*, Pembinaan peserta didik,: (1) Jumlah peserta didik dengan yang banyak dengan karakter dan lingkungan berbeda. (2) Waktu yang relatif sedikit di sekolah menjadikan peserta didik tidak maksimal dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. (3) Lingkungan yang salah akan menjadikan peserta didik rawan dengan situasi dan kondisi yang fatal bagi proses kehidupannya. (4) Konflik keluarga sangat berpengaruh terhadap psikologis bagi peserta didik saat di sekolah. *Ketiga*, Pengelolaan kantin. Sistem pengelolaan kantin kejujuran tidak secara langsung dilaksanakan oleh pihak sekolah, tapi dilaksanakan oleh penyewa.. *Keempat*, Keluarga. Beberapa anak yang nakal biasanya berasal dari keluarga yang mempunyai banyak kesibukan sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mendampingi putra putri mereka. Untuk membantu efektifitas penanaman nilai tersebut dilakukan beberapa langkah: *Pertama*, Profesionalisme guru, guru harus mampu membedakan mana kepentingan pribadi mana kepentingan umum, *Kedua*, pembinaan peserta didik. *Ketiga*. pengelolaan kantin yang baik,

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusnawati
NIM : 09.16.2. 0077
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Jurusan : Tarbiyah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiat atau duplikasi, tiruan, dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya. Bilamana di kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

IAIN PALOPO Palopo, Februari 2014
Yang membuat pernyataan

Yusnawati

PRAKATA

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعليه واصحابه
اجمعين (اما بعد)

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat disusun dalam rangka penyelesaian studi pada tingkat Strata satu (S1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo. Salawat dan salam atas Nabi Muhammad saw. beserta para sahabat dan keluarganya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan dan hambatan. Akan tetapi berkat bantuan dan partisipasi berbagai pihak, hal tersebut dapat teratasi, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini mudah-mudahan dapat bernilai pahala di sisi Allah Swt.

Ungkapan terima kasih terkhusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak. Prof. Dr. H. Nihaya M., M.Hum. selaku Ketua STAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan Tinggi, tempat penulis memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.
2. Bapak Sukirman, S. S., M.Pd. Selaku Wakil Ketua I, Bapak. Drs. Hisban Taha, M. Ag. Selaku Wakil Ketua II dan Bapak. Dr. Abdul Pirol, M. Ag. Selaku Wakil Ketua III STAIN Palopo, atas bimbingan dan pengarahannya, serta dosen dan asisten dosen yang telah membina dan memberikan arahan-arahan kepada penulis dalam kaitannya dengan perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi.
3. Bapak. Drs. Hasri, M.A. selaku Ketua Jurusan Tarbiyah, Bapak. Drs. Nurdin K, M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Tarbiyah dan Ibu Dra. St. Marwiyah, M.Ag., selaku Ketua Tim Kerja (Prodi) Program Studi Pendidikan Agama Islam yang di dalamnya penulis banyak memperoleh pengetahuan sebagai bekal dalam kehidupan.

4. Bapak. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., selaku pembimbing I dan Bapak. Firman, S. Pd., M.Pd. sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan motivasi, koreksi, dan evaluasi, sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Wahidah Djafar, S.Ag selaku Kepala Perpustakaan STAIN Palopo beserta stafnya yang banyak membantu penulis dalam memfasilitasi buku-buku literatur.

6. Kedua orang tua yang tercinta, atas segala pengorbanan dan pengertiannya yang disertai do'a dalam mengasuh, mendidik, dan membimbing penulis sejak kecil.

7. Rekan-rekan seperjuangan dan seangkatan penulis yang telah memberikan bantuannya baik selama masih di bangku kuliah maupun pada saat penyelesaian skripsi ini.

Atas segala bantuannya dan partisipasinya dari semua pihak penulis memohon kehadiran Allah Swt, semoga mendapat rahmat dan pahala yang berlipat ganda di sisi-Nya.

Akhirnya kepada Allah tempat berserah diri atas segala usaha yang dilaksanakan.
Amin.

Palopo, Februari 2014

Penulis

IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional Variabel.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian.	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	11
B. Tinjauan tentang Korupsi	12
C. Konsep Pendidikan Anti Korupsi.....	22
E. Kurikulum Pendidikan Agama Islam	35
F. Kerangka Pikir	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	38
B. Subjek Penelitian	39
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil penelitian.....	42
1. Gambaran Umum SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.....	42
2. Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.....	48

3. Kendala dan Solusi Implementasi Penanaman Nilai- Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu	57
B. Pembahasan	63
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Sara-saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



IAIN PALOPO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan problematika sosial yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat yang butuh penyelesaian bersama, ibarat penyakit, korupsi merupakan penyakit kronis yang terus menggerogoti semua tatanan nilai kehidupan bangsa ini, dan terus menular sampai seantero negeri, dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat serta dengan modus yang beragam.

Walaupun lima tahun terakhir peringkat Indonesia menurun tetapi jumlah negara yang di survei semakin bertambah, artinya dari tahun-ketahun tingkat korupsi di Indonesia tergolong tinggi dan meningkat. Hal ini diperkuat dengan hasil survei korupsi Indonesia menurut lembaga survey *Internasional Political and Economic Risk Consultancy* yang bermarkas di Hongkong, Indonesia merupakan negeri terkorup di Asia. Indonesia terkorup di antara 12 negara di Asia, diikuti India dan Vietnam. Thailand, Malaysia, dan Cina berada pada posisi keempat. Sementara negara yang menduduki peringkat terendah tingkat korupsinya adalah Singapura, Jepang, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan. Pencitraan Indonesia sebagai negara paling korup berada pada nilai 9,25 derajat, sementara India 8,9; Vietnam 8,67; Singapura 0,5 dan Jepang 3,5 derajat dengan dimulai dari 0 derajat sampai 10.¹

¹Ridwan Nasir, *Dialektika Islam Kontemporer* (IAIN Press & LKiS, 2006), h. 15.

Kasus korupsi di Indonesia terjadi di semua institusi dan lini kehidupan di negeri ini, korupsi menghinggap di semua institusi tanpa pandang bulu, bahkan rakyat di Indonesia dibuat tertunduk heran ketika departemen Agama yang notabene adalah representatif menjadi suri tauladan dan *uswah* bagi semua rakyat Indonesia, telah terjangkit kasus korupsi. Institusi yang seharusnya menjadi penggerak dan inspirator pertama dalam penataan nilai-nilai moral dan keagamaan baik secara normatif maupaun kolektif, malah ikut dalam kasus korupsi. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI tahun 2002 menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Departemen Agama (sekarang Kemenag), menyusul kemudian pada Departemen Pendidikan Nasional (Kemendiknas), yang di dalamnya seharusnya menjadi tauladan moral bagi masyarakat luas, dua institusi yang menangani dunia pendidikan dan moral, sungguh ironis. Institusi yang seharusnya sangat mulia karena menjadi tolak ukur kemajuan generasi bangsa ini tak luput dari penyakit kronis yang membahayakan, bernama korupsi.²

Dalam dunia pendidikan sendiri, korupsi semakin mengkhawatirkan dan mengancam pembangunan pendidikan di Indonesia, terealiasikanya kenaikan anggaran pendidikan 20%. Bergaris linier dengan penyimpangan anggaran pendidikan. Data Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh pola penyimpangan yang terjadi, yakni pengucuran dana tidak sesuai kebutuhan sekolah, keterlambatan pencairan, penyimpangan cara penyaluran, potongan tidak wajar, belanja tidak sesuai

²Moh. Asror Yusuf, *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), h.10.

peruntukan, pengurangan hasil, serta kebocoran dalam alokasi, penggunaan dan audit dana.

Permasalahan korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan gaya hidup.³ Bahkan fatwa-fatwa ulama NU dan Muhammadiyah tidak bisa menghentikan para koruptor di negeri ini, korupsi setiap tahun bertambah subur bak jamur di musim penghujan, perlu di catat bahwa Indonesia adalah negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia, yang setiap tahun selalu meningkat jumlah jama'ah hajinya, namun penyakit korupsi terus meningkat. Dan bahkan pelaku kejahatan korupsi di negeri ini adalah orang-orang yang mengaku muslim dan tahu persis tentang agama, sholat, zakat bahkan mereka ke tanah suci (haji) sudah tidak bisa di hitung.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghentikan dan memberantas korupsi yang ada di Indonesia, namun persoalan tersebut tidak pernah selesai, persoalan korupsi di Indonesia adalah persoalan yang sangat sulit untuk diselesaikan. Kita sadar bahwa memberantas korupsi di Indonesia bukanlah pekerjaan gampang dan hanya bisa dilakukan sekedarnya, memberantas korupsi dalam konteks Indonesia harus dilakukan secara holistik, komprehensif dan sistematis. tidak bisa dilakukan secara parsial,⁴ hal ini terjadi karena persoalan korupsi di Indonesia sudah memasuki seluruh bidang-bidang kehidupan sosial dan pemerintahan serta sudah bersifat sangat

³Muhammad Azhar, *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, 2003), h. 12.

⁴Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*, (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.) h. xvi.

mengakar (laten) dalam budaya hidup, perilaku dan cara berfikir. Serta sudah masuk pada rana mental yang sulit untuk diselesaikan dalam waktu yang singkat.⁵

Problematika korupsi yang sudah mengakar, membudaya serta sudah menjadi cara pikir, dan mental. Penanganan problematika korupsi harus dilakukan dengan cara yang lebih komprehensif dan pencegahan (preventif) sejak dini, karena salah satu sebab terjadinya korupsi adalah sudah mengakarnya mental korupsi di kalangan masyarakat Indonesia. Dan salah satu cara untuk melakukan pencegahan mental korupsi sejak dini adalah lewat jalur pendidikan.⁶

Strategi lewat media dunia pendidikan sangat penting selain gerakan politik, hukum dan sosial untuk pemberantasan korupsi, pendidikan dianggap dapat melakukan perbaikan mental sejak dini, mengingat pendidikan dapat menjadi instrumen pencegahan mental korupsi anak sejak dini, hal ini di sadari bahwa pemberantasan korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif (pencegahan) Pendidikan adalah proses pembelajaran atau penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.⁷

Pendidikan juga merupakan basis penanaman nilai-nilai pada individu untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. dan disinilah letak

⁵Andar Nubowo. *Membangun gerakan antikorupsi dalam perspektif pendidikan*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004), h. 34.

⁶Harlina Helmanita, Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah, 2006), h. 67.

⁷Syaiful Sagala, *Konsep dan makna Pembelajaran* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 87.

pentingya pendidikan dalam usaha pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, penanaman nilai-nilai anti korupsi lewat pendidikan di harapkan akan melahirkan out-put anak didik bermental anti korupsi, dan menjadikan korupsi sebagai musuh bersama yang harus di jauhi sejak dini.

Gerakan pencegahan (*presventif*) korupsi lewat pendidikan dapat menjadikan generasi muda bangsa ini menjadi generasi yang tangguh, disiplin dan mau bekerja keras dan anti korupsi, yang tentunya akan mencega mental korupsi anak bangsa yang akan datang, mengingat bahwa penanaman mental korupsi tidak hanya di lakukan pada satu generasi saja, tetapi dua generasi, tiga dan seterusnya, sehingga bangsa ini benar-benar bersih dari penyakit kronis korupsi. sudah saatnya dunia pendidikan kita disentuh oleh persoalan-persoalan riil yang berlangsung di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Ketika perilaku korupsi sudah demikian mengakar di berbagai lapis dan lini kehidupan masyarakat, sudah seharusnya para siswa didik yang kelak akan menjadi penentu masa depan negeri ini, diperkenalkan dengan masalah-masalah korupsi untuk selanjutnya diajak bersama-sama memberikan sebuah pencitraan bahwa korupsi harus menjadi *public enemy* yang harus dihancurkan bersama. Para siswa didik perlu tahu betapa berbahayanya perilaku korupsi , sehingga mereka diharapkan memiliki filter yang amat kuat untuk tidak tergoda melakukan tindakan-tindakan korup.

Gagasan pemberantasan korupsi lewat pendidikan di atas yang kemudian dinamakan dengan “pendidikan antikorupsi”⁸ gagasan ini dimaksudkan untuk membasmi korupsi melalui persilangan (*intersection*) antara pendidikan watak dan pendidikan kenegaraan. Di samping itu juga, pendidikan untuk memberantas korupsi dengan pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Pendidikan antikorupsi didasarkan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara integratif dan simultan yang mesti berjalan beriringan dengan tindakan represif terhadap koruptor. Karena itulah, pendidikan antikorupsi mesti didukung. Jangan sampai timbul keawaman terhadap korupsi dan perilaku koruptif.

Pemberantasan korupsi dengan pendekatan pendidikan juga harus dilakukan dalam pendidikan yang berbasis agama. Sebagai bagian integratif dari pendidikan nasional,⁹ pendidikan Islam diharapkan mempunyai peran sangat signifikan bagi pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia, pendidikan Islam perlu mengagas dan mengembangkan nilai-nilai anti korupsi, mengingat korupsi merupakan penyakit moral dan pendidikan Islam sendiri mempunyai fungsi membentuk anak didik yang mempunyai tingkah laku, sikap dan kepribadian yang bermoral dan berakhlakul

⁸Andar Nubowo, *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004). h. 89.

⁹Haidar Putra Daulay, MA, *Pendidikan Islam dalam Sistem pendidikan nasional di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 38.

karimah pendidikan Islam mendapatkan momentum untuk dapat memberikan sumbangnsi bagi pemberantasan korupsi.¹⁰

Berangkat dari pokok permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Antikorupsi dan Implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Penelitian ini merupakan tugas akhir perkuliahan (skripsi) yang disusun berdasarkan metode yang berlaku di STAIN Palopo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka secara sederhana rumusan tersebut mengandung pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana Kendala dan solusi yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Antikorupsi dan implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah tersebut, maka ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini :

¹⁰Achmadi, *Idiologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 90.

1. Untuk mengetahui bagaimana Penanaman nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

2. Untuk mengetahui bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam penanaman nilai-nilai pendidikan Antikorupsi dan implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmiah

Dengan penulisan ini diharapkan menjadi salah satu sumber pemikiran dan referensi bagi para pendidik dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan antikorupsi terutama pada lembaga pendidikan Islam sejak dini.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana bagi pengambilan kebijakan tentang pelaksanaan pendidikan khususnya dalam ruang lingkup pendidikan agama Islam dan nilai-nilai pendidikan antikorupsi.

E. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian

Definisi operasional adalah definisi didasarkan atas sifat-sifat yang dipahami. Definisi operasional perlu dicantumkan, untuk menghindari terjadinya

kesalahpahaman atau intersepsi judul skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti memberikan penegasan-penegasan yang sekaligus juga merupakan pembatasan pengertian di antara istilah-istilah yang perlu kejelasan adalah:

1. Pendidikan

Berdasarkan tujuan pendidikan nasional menurut undang-undang no.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, menjelaskan bahwa arti pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlakul karimah, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan juga bisa di artikan proses pembelajaran atau penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat, suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.¹¹

2. Antikorupsi

Anti didefinisikan sebagai benci; menolak, melawan,menentang, sedangkan korupsi menurut Syeh Husain Alatas diartikan sebagai sebagai penyalagunaan amanat untuk kepentingan pribadi. istilah korupsi sering di tujukan kepada serangkain

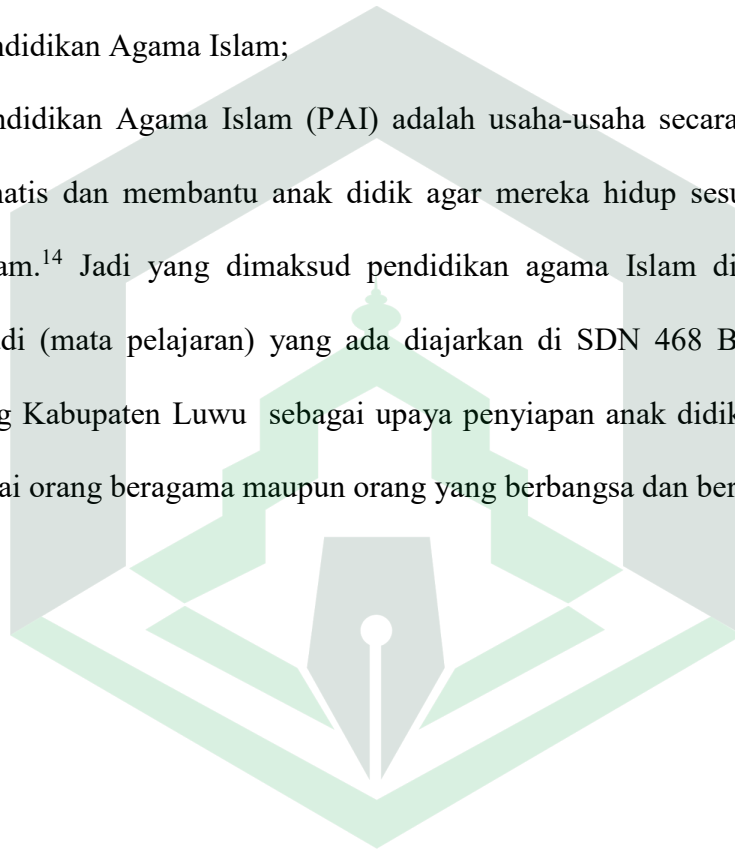
¹¹Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2003, *sistem pendidikan nasional* (Bandung: Citra, 2003), h. 7.

tindakan-tindakan terlarang dan melanggar hukum dalam rangkah mendapat keuntungan dengan merugikan orang lain.¹²

3. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar.¹³

4. Pendidikan Agama Islam;

Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah usaha-usaha secara sadar, sistematis dan pragmatis dan membantu anak didik agar mereka hidup sesuai dengan ajaran agama Islam.¹⁴ Jadi yang dimaksud pendidikan agama Islam disini adalah suatu bidang studi (mata pelajaran) yang ada diajarkan di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sebagai upaya penyiapan anak didik yang berkualitas baik sebagai orang beragama maupun orang yang berbangsa dan bernegara.



IAIN PALOPO

¹²Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *Mengenali dan Memberantas Korupsi* (Jakarta: KPK, 2005), h. 3.

¹³E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 46.

¹⁴Zuhairini, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Malang, Usaha Nasional, 1983), h. 27.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian Kolektif yang diadakan oleh Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, Andi Suhardiyat dengan judul “*Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di SMA 6 Kota Semarang*”. Penelitian ini merupakan penelitian kolektif yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil evaluasi, pengamatan, dan tanggapan langsung dari peserta kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi di SMA 6 Kota Semarang ini dapat berjalan sesuai dengan rencana. Partisipasi dan tanggapan peserta sangat baik. Siswa selaku peserta kegiatan pengabdian penanaman nilai-nilai kejujuran melalui pendidikan anti korupsi pada akhirnya mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai definisi korupsi, jenis-jenis korupsi, dampak buruk korupsi dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk berperan serta dalam memberantas korupsi. Melalui sosialisasi ini diharapkan terjadi perubahan sikap siswa sekolah menengah

dari sikap membiarkan, memahami, dan memaafkan korupsi ke sikap menolak korupsi.¹

Selain penelitian tersebut peneliti tidak mendapati penelitian terdahulu yang membahas tentang pendidikan anti korupsi.

B. Tinjauan Tentang Korupsi

1. Definisi Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, dimana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir kuno, Babilonia, Roma, sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi korupsi dilakukan oleh para jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya, untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktek korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar sudah berlangsung dan tercatat di dalam sejarah Mesir, Babilonia, Ibrani, India, Cina, Yunani, dan Romawi kuno.²

IAIN PALOPO

¹Eko Handoyo, Subagyo, Martien Herna Susanti, Andi Suhardiyat dengan judul “*Penanaman Nilai-Nilai Kejujuran Melalui Pendidikan Anti Korupsi Di SMA 6 Kota Semarang*, penelitian kolektif (Semarang: UNS, 2010), h. 10.

²Ridlwan Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer* (Yogyakarta: IAIN Press, 2006), h. 277.

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam perdana menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu dalam literatur Islam,³ pada abad ke-7 Nabi Muhammad saw. juga telah memperingatkan sahabatnya untuk meninggalkan segala bentuk tindakan yang merugikan orang lain yang kemudian dikenal sebagai bagian dari korupsi.

Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya.⁴ *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap.⁵

Dalam kamus besar bahasa Indonesia korupsi berasal dari kata korup yang artinya: buruk, rusak, busuk; suka menerima uang sogok; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi) sedangkan korupsi bermakna perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri .⁶

IAIN PALOPO

³Ahmad Fawa'id, Sultonul Huda, *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih. op. cit.*, h. 1.

⁴Muhammad Azhar (Et.al), *Pendidikan Antikorupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, 2003) h. 28.

⁵Ridlwani Nasir, *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer, op. cit.*, h. 281-282.

⁶Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 813.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasikan adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public officials*) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Senada dengan Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas yang lebih luas: "*Corruption is abuse of trust in the interest of private gain*", Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁷

Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dari definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab milik pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling urgen dalam

⁷Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006) h. 10.

mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena, perlu ada paradigma baru yang merupakan perubahan paradigma ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

2. Bentuk-bentuk Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah sudah mulai dilakukan secara sistematis baik oleh perorangan maupun berkelompok (berjamaah), serta semakin meluas dan semakin canggih dalam proses pelaksanaannya. Korupsi ini semakin memprihatinkan bila terjadi dalam aspek pelayanan yang berkaitan dengan sektor publik, mengingat tugas dan kewajiban utama dari aparat pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat.

Korupsi pada hakekatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara.

Untuk mencabut akar permasalahan sumber terjadinya korupsi di sektor publik, perlu didefinisikan pula sifat atau model dari korupsi dan dilakukan pengukuran secara komprehensif dan berkesinambungan. Untuk dapat mendefinisikan model korupsi, dimulai dengan melakukan pengukuran secara

obyektif dan komprehensif dalam mengidentifikasi jenis korupsi, tingkat korupsi dan perkembangan korupsi dan menganalisa bagaimana korupsi bisa terjadi dan bagaimana kondisi korupsi saat ini. Seiring dengan perkembangan jaman dan budaya masyarakat korupsi pun ikut tumbuh sedemikian rupa sehingga memiliki bentuk, model atau jenis yang beragam. Banyak para pakar yang telah mencoba mengelompokkan jenis-jenis atau model-model korupsi. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat diringkas secara umum bentuk-bentuk, karakteristik atau ciri-ciri, dan unsur-unsur (dari sudut pandang hukum) korupsi sebagai berikut:

- a. *Penyuapan (bribery)* mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang.
- b. *Embezzlement*, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu.
- c. *Fraud*, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan (trickery or swindle). Termasuk didalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan-keuntungan tertentu.
- d. *Extortion*, tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi-intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Lazimnya dilakukan oleh mafia-mafia lokal dan regional.

e. Favouritism, adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya.⁸

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi dalam buku yang disusun oleh Syamsul Anwar., M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi. Pertama, korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Kedua, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. Ketiga, korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya. Keempat, korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.⁹

Tiap tindakan korupsi pasti mengandung pengkhianatan kepercayaan dan penyimpangan. Lebih jauh lagi pengkhianatan kepercayaan ini bukan hanya terhadap kepercayaan dari publik atau masyarakat, melainkan juga kepercayaan dari Allah swt. yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Penyimpangan terhadap nilai-nilai yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah diantaranya adalah nilai integritas, akuntabilitas, dan kepemimpinan. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan

⁸[www. Bentuk-bentuk korupsi/kpk/Indonesia/.com](http://www.Bentuk-bentuk_korupsi/kpk/Indonesia/.com) diakses pada tanggal 14 Maret 2013.

⁹Syamsul Anwar, *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: PSAP, 2006), h. 18.

pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya.

3. Sebab-sebab Korupsi

Secara umum, munculnya perbuatan korupsi didorong oleh dua motivasi. Pertama, motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari perilaku itu sendiri.¹⁰

Motivasi kedua ini seperti adanya alasan melakukan korupsi karena ekonomi, ambisi memperoleh jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan secara pintas. Secara psikologis, menggambarkan bahwa Dalam istilah lain juga disebutkan faktor korupsi terdiri dari faktor internal (dari dalam diri) dan faktor eksternal (dari luar diri). Faktor internal semisal sifat rakus terhadap harta, atau terbentur kebutuhan mendesak yang memicu seseorang melakukan korupsi. Sedangkan faktor eksternal seperti sistem pemerintahan yang memberikan peluang korupsi, lemahnya pengawasan-hukum, dan tidak adanya akuntabilitas yang menjadi penyebab korupsi yaitu:

- a. Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi kunci yang mempengaruhi tingkah laku menjinakkan korupsi.
- b. Kelemahan pengajaran agama dan etika.

¹⁰*Ibid.*,h. 13.

- c. Konsumerisme dan globalisasi.
- d. Kurangnya pendidikan.
- e. Kemiskinan.
- f. Tidak adanya tindak hukuman yang keras.
- g. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku antikorupsi.
- h. Struktur pemerintahan.¹¹

Secara umum penyebab terjadinya korupsi secara universal juga dikarenakan: lemahnya pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, struktur pemerintahan atau kepemimpinan organisasi (baik profit maupun non profit) yang bersifat tertutup (tidak transparan) dan cenderung otoriter, kurang berfungsinya lembaga perwakilan rakyat sebagai kekuatan penyeimbang bagi eksekutif, tidak berfungsinya lembaga pengawasan dan penegakan hukum serta sanksi hukum yang tidak menjerahkan bagi pelaku korupsi, minimnya keteladanan pemimpin atau pejabat dalam kehidupan sehari-hari, rendahnya upah pegawai atau karyawan yang berakibat rendahnya tingkat kesejahteraan.

Hal yang tak kalah pentingnya juga untuk dapat mencegah secara efektif terjadinya korupsi adalah hendaknya dihindari pengukuran korupsi yang semata-mata bertujuan untuk mendeteksi pelaku korupsi dan menghukumnya. Penting untuk mulai menempatkan strategi pencegahan korupsi dengan tujuan untuk mengeliminasi faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi sejak dini. Dalam

¹¹Syed Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1975), h. 46.

menetapkan strategi pencegahan korupsi, perlu diidentifikasi dan dianalisa faktor-faktor yang menjadi akar penyebab yang berkontribusi menimbulkan korupsi pada lembaga publik dan layanan publiknya. Semua sebab-sebab di atas terkadang menyatu. Dengan kata lain, seorang koruptor disamping mentalnya serakah, dipicu oleh kebutuhan dasar ekonomi yang tinggi, juga ditunjang adanya peluang untuk melakukan korupsi.

4. Korupsi dalam Pandangan Islam

Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan sang Khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan manusia dengan alam (*hablum minal 'alam*). Oleh karenanya, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Lebih jauh, Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Hal tersebut mengandung unsur universalitas Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Sebagaimana statemen dalam Q.S al-Baqarah/2:208;


































































































































































































































































Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.¹²

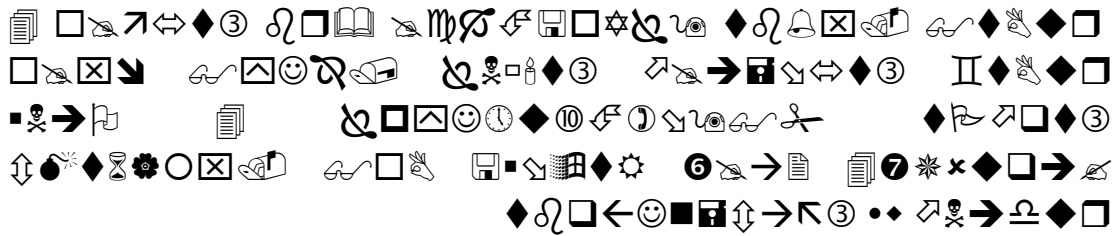
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi dikarenakan para pelaku tidak menjalankan Islam secara keseluruhan.

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi.¹³

Dilihat dari sisi penggelapan harta publik, maka korupsi lebih dekat dengan *ghulul*. Diantaran beberapa konsep kejahatan harta benda yang ada dalam fiqih, *ghulul* mempunyai karakteristik yang paling dekat dengan korupsi, karena baik korupsi maupun *ghulul* sama-sama melibatkan kekuasaan dan menyangkut harta publik serta bisa dilakukan oleh pihak yang berada dalam maupun di luar kekuasaan. Banyak ulama juga menganalogikan korupsi dengan *al-ghulul*, sebuah istilah yang diambil dari Q.S Ali 'Imran (3): 161;

¹²Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Jumanatul 'Aly, 2005), h. 425.

¹³Yunahar Ilyas, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama (Panduan Untuk Pemuka Umat)* (Yogyakarta: KUTUB, 2001), h. 15.



Terjemahnya:

Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, Maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.¹⁴

Secara leksikal dapat dipahami bahwa pengertian dari ayat ini adalah “pengkhianatan atau penyelewengan”, namun dalam wilayah perkembangan kajian fiqih Islam khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer istilah ini didefinisikan setara dengan “korupsi”.

5. Penanaman Anti Korupsi di Sekolah

”Tiada ruang tanpa korupsi ” demikian ungkapan aktifis LSM anti korupsi KP2KKN semarang, Bonyamin saat diskusi yang diselenggarakan wartawan Pokja Pemprov Jateng. Sebelumnya, sejumlah lembaga juga mengakui bahwa indonesia adalah bangsa yang korup. Begitu korupnya sampai pengamat sosial J. Kristiadi, mengatakan, korupsi teelah menjadi kultur bangsa Indonesia.¹⁵

Realitas tersebut tentu saja sangat menyedihkan, dan akan lebih menyedihkan jika kita mengingat sindiran bung hatta, bahwa abad besar ini telah menjadikan

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op. cit., h. 435.

¹⁵A. S. Burhan, dkk., *Memerangi Korupsi ;Geliat Agamawan atas Problem Korupsi di Indonesia*. (Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M, 2004), h. 172

bangsa indonesia sebagai bangsa yang kerdil (imannya). Walaupun agak bernada pesimis, terbukti akhir-akhir ini banyak generasi yang hanya ”gandrung” akan budaya pragmatis, hedonis dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan carut marutnya pemerintahan yang disebabkan karena korupsi. Kalau dilihat dari struktur masyarakat kita, mestinya korupsi sulit masuk di negara kita yang notabene disebut bangsa yang religius, artinya bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Saat ini kita lihat sistem sosial dan budaya masyarakat telah berkembang sedemikian rupa sehingga membuat praktik korupsi makin subur. Apalagi demoralisasi individu telah berkembang ke arah makin parah. Fenomena korupsi memberi pelajaran bahwa pemberdayaan SDM melalui pendidikan internal (dari, oleh dan untuk diri sendiri/otodidak) maupun eksternal (melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal) harus segera dicarikan dan dilakukan dengan paradigma baru.

Dalam menanggulangi korupsi harus ada upaya pendekatan dan strategi integral termasuk melakukan reformasi disegala bidang. Salah satu upaya yang hendaknya ditempuh adalah upaya preventif atau pencegahan. Upaya itu adalah melaksanakan pendidikan anti korupsi dengan melaksanakan pembelajaran berdasarkan pengalaman tentang nilai-nilai anti korupsi. Mendidik sendiri pada umumnya dipahami sebagai suatu cara untuk menyiapkan dan membantu seseorang untuk mencapai suatu tujuan hidup, yaitu menjadi manusia utuh, sempurna dan bahagia.

Sekolah dipercaya sebagai tempat strategis untuk menyosialisasikan perilaku antikorupsi karena di sanalah penanaman nilai diberikan secara jelas dan terarah.

Lewat sekolah, anak didik bisa menyerap banyak materi tentang bentuk-bentuk korupsi serta bahayanya.

Pembelajaran sekaligus penanaman nilai-nilai itu, diharapkan bias tercetak sumber daya manusia yang memiliki kesadaran hukum tinggi sekaligus menggugah, kesadaran mereka untuk menghindari perbuatan berbau korup. Lebih jauh lagi, pendidikan antikorupsi diharapkan mampu memutus mata rantai tindak pidana korupsi yang sudah begitu mengakar di Indonesia (lihat tabel). Namun, tentu saja, upaya ini tak hanya ditujukan bagi anak didik. Agar berjalan efektif, para pendidik juga harus berperan serta memberikan teladan bagi peserta didik dengan menerapkan budaya antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran yang efektif menurut M. Sobry Sutikno adalah suatu pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan dan dapat tercapai tujuan pembelajaran sesuai dengan harapan.¹⁶

Dalam buku *Educational Psychology* dinyatakan bahwa *learning is an active process that needs to be stimulated and guided toward desirable outcomes*.¹⁷ (Pembelajaran adalah proses aktif yang membutuhkan rangsangan dan tuntunan untuk menghasilkan hasil yang diharapkan). Pada dasarnya pembelajaran merupakan

¹⁶M. Sobry Sutikno, *Pembelajaran Efektif: Apa dan Bagaimana mengupayakannya?*(Mataram: NTP Press, 2005), h. 37.

¹⁷Lester D. Crow and Alice Crow, *Educational Psychology*, New York: American Book Company, 1958), h. 225.

interaksi antara guru dan peserta didik, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.

Proses pembelajaran harus diupayakan dan selalu terikat dengan tujuan (goal based). Oleh karenanya, segala interaksi, metode dan kondisi pembelajaran harus direncanakan dan mengacu pada tujuan pembelajaran yang dikehendaki. Menurut E. Mulyasa bahwa proses pembelajaran pada hakekatnya merupakan proses interaksi para peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku yang baik. Dalam interaksi tersebut banyak diketahui oleh faktor internal yang dipengaruhi oleh diri sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pembelajaran, tugas seorang guru yang utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang perubahan perilaku peserta didik.¹⁸

Menurut Mochtar Buchori, terkait dengan korupsi, yaitu ada tiga hal yang harus dilakukan: *Pertama*, korupsi hanya dapat dihapuskan dari kehidupan kita secara berangsur-angsur. *Kedua*, pendidikan untuk membasmin korupsi berupa persilangan (intersection) antara pendidikan watak dan pendidikan kewarganegaraan. *Ketiga*, Pendidikan untuk mengurangi korupsi harus berupa pendidikan nilai, yaitu pendidikan untuk mendorong setiap generasi menyusun kembali sistem nilai yang diwarisi. Dengan demikian, diharapkan Indonesia mampu untuk keluar dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, dan memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Itu semua tidak akan maksimal ketika tanpa peran serta dari masyarakat, termasuk

¹⁸E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 100.

halnya lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk membangun kekuatan bersama Pendidikan nilai agama di lingkungan sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting¹⁹. Hal ini karena disebabkan karena adanya pergeseran dan perubahan sistem nilai maupun nilai-nilai itu sendiri dalam masyarakat.

Perubahan-perubahan itu diantaranya ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan suasana di dalam masyarakat, perubahan perkembangan hukum dan perubahan cara berfikir masyarakat.²⁰ Pendidikan Agama Islam merupakan salah satu dari sekian banyak mata pelajaran yang diharapkan mampu menjadi kontrol bagi setiap individu yang konsekuen dan kokoh dalam perannya sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai Antikorupsi yang integrative-inklusif dalam pendidikan agama Islam secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran berbasis kontekstual, sehingga dapat melekat pada dirinya dan menjadi kepribadian bagi peserta didik.

Proses penanaman nilai-nilai budi pekerti menurut Mochtar Buchori, ada lima fase yang harus dilakukan peserta didik untuk memiliki moral atau karakter. *Pertama* Knowing, yaitu mengetahui nilai-nilai. *Kedua* comprehending yaitu memahami nilai-nilai. *Ketiga* Accepting yaitu menerima nilai-nilai. *Keempat* Internalizing yaitu

¹⁹Mochtar Buchori, *Pendidikan Anti Korupsi*, lihat : (Kompas, Rabu, 21-02-2007 / <http://home.kompas.co.id>)

²⁰Drs. Mawardi Lubis, *Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008). h. xi

mejadikan nilai sebagai sikap dan keyakinan. *Kelima* Implementing yaitu mengamalkan nilai-nilai.²¹

a. Pendekatan penanaman nilai anti korupsi

Pada hakekatnya Pendekatan adalah suatu cara memandang terhadap suatu hal. Dengan demikian pendekatan dalam pendidikan yang secara mikro adalah kegiatan belajar mengajar mengandung makna bagaimana kita memandang proses belajar mengajar itu.

Pada pelaksanaannya pendekatan pada penanaman nilai anti korupsi pada pembahasan kali ini, perlu dijabarkan ke dalam pembelajaran PAI, yaitu:

1) Pendekatan Pembiasaan

Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk senantiasa mengamalkan ajaran agamanya.

2) Pendekatan emosional

Pendekatan ini merupakan usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam menyakini, memahami, dan menghayati akidah Islam serta memberi motivasi agar peserta didik ikhlas mengamalkan ajaran agamanya, khususnya yang berkaitan dengan akhlakul karimah.²²

Pendekatan emosional salah satu bentuk proses dimana seorang guru membimbing meridnya. Menurut Robert L. Gibson bimbingan adalah *"The process*

²¹*Ibid.*

²²Muhaimin, dkk, *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2001), h. 174.

of assisting individuals in making life adjustmen. It is needed in the home, school, community, and in all other phases of the individual's environment".²³ (Bimbingan dapat dikatakan sebagai proses pengarahan individu untuk membuat sebuah penyesuaian hidup, hal ini diperlukan di rumah, sekolah, komunitas dan seluruh fase lingkungan individu.). Jadi, pendekatan emosional sangat dibutuhkan pendidik untuk melakukan upaya mengarahkan, memotivasi peserta didik dalam kehidupannya baik di rumah, sekolah maupun lingkungannya agar dapat menerima apa yang seharusnya dilakukan dengan optimal.

3) Pendekatan rasional

Yakni usaha untuk memberikan kepada rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebenaran ajaran agama. Informasi-informasi tentang nilai baik dan benar akan diolah secara psikologis yang melahirkan sikap efektif terhadap obyek nilai tersebut. Apabila kesadaran rasionalnya menerima suatu obyek ilai sebagai kebenaran, maka sikap efektifnya akan memberikan dorongan untuk menyenangi, menyetujui, dan menghargai terhadap nilai tersebut.

IAIN PALOPO

4) Pendekatan fungsional

²³Robert L. Ginson and Marianne H. Mitchell, *Introduction to Guidance*, (United States of America: Macmillan publishing Co., Inc., 1981), h 14.

Yaitu usaha menyajikan ajaran agama Islam dengan menekankan kepada segi kemanfaatannya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tingkat perkembangannya

5) Pendekatan keteladanan

Pendekatan ini dilakukan dengan menyuguhkan keteladanan, baik yang langsung melalui penciptaan kondisi pergaulan yang akrab antara personal sekolah, perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang mencerminkan akhlak terpuji maupun tidak langsung melalui suguhan ilustrasi berupa kisah-kisah keteladanan.

Dengan melihat dan mengamati kepribadian seseorang yang memiliki konsistensi dan keteladanan yang dapat diandalkan, akan tumbuh kesadaran peserta didik untuk menerima nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang baik dan benar.

b. Strategi penanaman nilai anti korupsi

Strategi sebenarnya berasal dari istilah kemiliteran yaitu usaha untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan dengan tujuan mencapai kemenangan/kesuksesan.

Jika strategi ini dimasukkan dalam dunia pendidikan secara makro dan skala global, strategi merupakan kebijakan-kebijakan yang mendasar dalam pengembangan pendidikan sehingga tercapai tujuan pendidikan secara lebih terarah, lebih efektif dan efisien.

Menurut Noeng Muhadjir, sebagaimana dikutip oleh Chabib Toha, ada beberapa strategi yang bisa digunakan dalam pembelajaran nilai, yaitu:

1) Strategi tradisional.

Yaitu dengan jalan memberikan nasehat atau indoktrinasi. Strategi ini ditempuh dengan jalan memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan yang kurang baik.

2) Strategi bebas

Yaitu peserta didik diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih dan menentukan nilai mana yang akan diambilnya karena nilai yang baik belum tentu baik pula bagi peserta didik itu sendiri

3) Strategi reflektif

Yaitu dengan jalan mondar mandir antara menggunakan pendekatan teoritik ke pendekatan empirik, atau pendekatan deduktif dan induktif.

4) Strategi transinternal

Yaitu guru dan peserta didik sama-sama terlibat dalam proses komunikasi aktif, yang tidak hanya melibatkan komunikasi verbal dan fisik tapi juga melibatkan komunikasi batin (kepribadian) antara keduanya. Strategi ini merupakan cara untuk membelajarkan nilai dengan jalan melakukan transformasi nilai, dilanjutkan dengan transaksi dan transinternalisasi.²⁴

c. Metode penanaman nilai anti korupsi

Banyak di antara kita yang habis kesabaran saat menyaksikan berbagai usaha menghapus korupsi tidak menunjukkan kemajuan berarti. Kita seperti lari di tempat,

²⁴HM. Chabib toha, *Kapeta Selekt...* Op. Cit, h. 77-78 .

secepat apapun larinya kita selalu menemukan diri di tempat yang sama. Bisa dikatakan metode pendidikan dalam pendidikan nilai masih memiliki kelemahan karena dikonsentrasikan pada pengembangan otak kiri/kognitif yang cirinya adalah hanya mewajibkan peserta didik untuk mengetahui dan menghafal konsep dan kebenaran tanpa menyentuh perasaan, emosi dan nuraninya.

Oleh karena itu, Pendekatan di atas kemudian dijabarkan ke dalam beberapa metode pembelajaran PAI yang berorientasi pada penanaman nilai. Metode tersebut antara lain:

1) Metode dogmatik

Metode ini merupakan metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat itu sendiri

2) Metode deduktif

Metode ini menyajikan nilai-nilai kebenaran dengan jalan menguraikan konsep-konsep kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik.

3) Metode Induktif

Yaitu membelajarkan nilai yang di mulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut.

4) Metode reflektif

Metode ini merupakan gabungan dari penggunaan metode deduktif dan induktif, yaitu membelajarkan nilai-nilai dengan jalan mondar-mandir antara melihat

kasus–kasus kehidupan sehari-hari, kemudian dikembalikan kepada konsep teoritiknya yang umum atau sebaliknya.²⁵

d. Teknik penanaman nilai anti korupsi

Teknik pembelajaran PAI yang berorientasi pada nilai (afektif) ada beberapa macam, diantaranya :

1) Teknik Indoktrinasi

Prosedur teknik ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu *Pertama*, tahap *brainwashing*, yakni pendidik memulai pendidikan nilai dengan jalan merusak tata nilai yang sudah mapan dalam pribadi peserta didik untuk dikacaukan, sehingga mereka tidak mempunyai pendirian lagi. *Kedua*, Tahap menanamkan fanatisme, yakni pendidik menanamkan ide-ide baru yang dianggap benar sehingga nilai –nilai yang ditanamkan masuk kepada peserta didik tanpa melalui pertimbangan rasional yang mapan. *Ketiga*, Tahap penanaman doktrin, pada saat penanaman doktrin ini hanya dikenal adanya satu nilai kebenaran yang disajikan, dan tidak ada alternatif lain. Teknik indoktrinasi dipergunakan untuk strategi tradisional, pendekatan doktriner dan otoritatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode dogmatik.

2) Teknik Klarifikasi

Teknik ini merupakan suatu cara untuk membantu peserta didik untuk menentukan nilai-nilai yang akan dipilih. Dalam teknik terdapat beberapa tahap yang

²⁵Muhaimin, dkk. *op. cit.* h. 174-176.

dilalui, yaitu tahap pemberian contoh, tahap mengenali kelebihan dan kekurangan nilai, dan tahap mengorganisasikan tata nilai pada diri peserta didik.

3) Teknik moral reasoning

Teknik ini sama dengan penggunaan problem solving dalam proses belajar mengajar. Peserta didik dihadapkan pada penyajian nilai moral yang dilematis untuk dinilai dan dievaluasi oleh peserta didik, kemudian mereka diminta memilih nilai-nilai yang baik dan benar untuk diikuti.

4) Teknik meramalkan konsekuensi

Teknik merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai, dalam arti mengandalkan kemampuan berfikir peserta didik untuk membuat proyeksi tentang hal-hal yang akan terjadi dalam penerapan satu sistem nilai tertentu.

5) Teknik menganalisis nilai

Teknik merupakan penerapan dari pendekatan rasional dalam mengajarkan nilai kepada peserta didik. Penggunaan teknik ini bertujuan memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik dalam memilih nilai agar mereka yakin benar bahwa nilai yang dipilih didasarkan atas kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan

6) Teknik internalisasi nilai

Sasaran teknik ini adalah sampai pada tahap pemilihan nilai yang menyatu dalam kepribadian peserta didik, atau sampai pada taraf karakterisasi atau mewatak. Tahapan teknik ini terdiri dari; 1. Transformasi nilai, guru sekedar menginformasikan nilai-nilai yang baik dan yang kurang baik kepada peserta didik, semata-mata merupakan komunikasi verbal. 2. Transaksi nilai, tahap pendidikan nilai dengan jalan

melakukan komunikasi dua arah, atau interaksi yang bersifat timbal balik. 3. Trasinternalisasi, tahap ini jauh lebih dalam dari sekedar transaksi, komunikasi yang terjadi adalah komunikasi dua kepribadian yang masing-masing terlibat secara aktif.²⁶

C. Konsep Pendidikan Antikorupsi

Sebagaimana halnya negara-negara lainnya, perilaku koruptif di Indonesia sudah berlangsung sepanjang sejarah. Secara kualitatif, puluhan tahun lalu Bung Hatta pernah memberikan label atas hal korupsi sebagai perilaku yang telah membudaya. Bahkan secara kuantitatif, pakar ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo pernah mengemukakan pernyataan kontroversial yang menyatakan bahwa kebocoran anggaran pembangunan di Indonesia mencapai 30 persen.²⁷

Meski begitu kompleksnya problematika korupsi, pendidikan masih dapat diharapkan untuk menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai antikorupsi kepada para anak didik, sehingga sejak dini mereka memahami bahwa korupsi itu bertentangan dengan norma hukum maupun agama. Hal tersebut dapat dicermati setidaknya dikarenakan dua hal. Pertama, gejala reduksi moralitas sebagian besar Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia, dengan indikasi empirik masih tingginya angka korupsi. Kedua, arus masuk generasi muda ke lembaga pendidikan setiap jenjang

²⁶HM. Chabib Toha, *op. cit.*, h. 87-94.

²⁷Sudarwan Danim, *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) h. 61.

sebagai bagian dari diskursus pengembangan SDM Indonesia yang seutuhnya. Hal ini sangat berkaitan, karena orang-orang yang terpilih mengemban amanat rakyat, terutama mereka yang duduk di lingkungan birokrasi, diidealisasikan sebagai SDM terdidik sebagai output dari lembaga pendidikan.

Manusia Indonesia menempati posisi sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia secara optimal. Lebih lanjut pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, mulai dari dalam keluarga hingga lingkungan sekolah dan masyarakat.

D. Kurikulum Pendidikan Agama Islam

1. Pengertian Asas-Asas Kurikulum

Pengertian Kurikulum secara tradisional diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, namun dalam perkembangan kurikulum sebagai suatu kegiatan pendidikan kurikulum didefinisikan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik.²⁸

²⁸www.depdiknas.go.id. Diakses pada tanggal 14 Maret 2013.

Ahmad Tafsir mendefinisikan kurikulum sebagai suatu alat yang membawa orang dari start sampai finish.²⁹ Pada perkembangannya istilah kurikulum kemudian dipakai dalam bidang pendidikan, dengan arti sejumlah mata pelajaran di suatu perguruan.

2. Pengertian Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI)

Istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan yang menghasilkan suatu alat atau cara baru, dimana selama kegiatan tersebut terus dilakukan dengan penyempurnaan-penyempurnaan dan akhirnya cara tersebut dipandang untuk dilakukan. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru melalui langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilakukan selama periode waktu tertentu, pengembangan kurikulum berarti perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum ke kurikulum lain, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu panjang.³⁰

Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengkaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang lebih baik.³¹

²⁹Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam* (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 53.

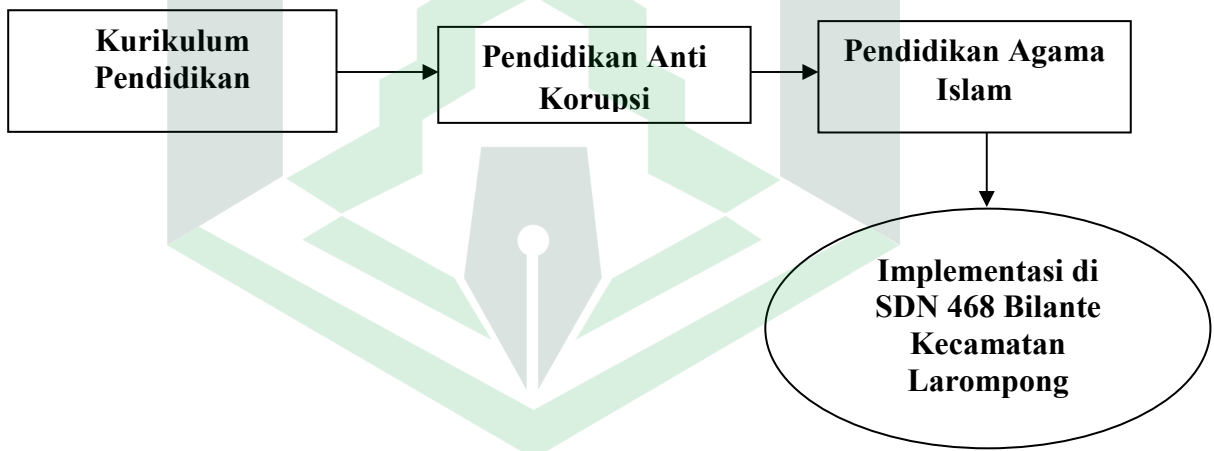
³⁰Hendyat Soetopo dan Wast Soenanto, *pembinaan dan pengembangan kurikulum* (Jakarta: bumiaksara, 1993), h. 45.

³¹Subandiah, *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 36.

E. Kerangka Pikir

Dari gambar berikut dapat diketahui kurikulum pendidikan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pendidikan sekolah (Sekolah Dasar) memuat beberapa point diantaranya pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini dimuat dalam buku ajar Pendidikan Agama Islam (PAI). Hal tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah untuk memberantas korupsi sejak dini, penanaman sejak dini dilakukan untuk menekan tingkat perkembangan korupsi di tanah air.

Untuk lebih memperjelas siklus penelitian ini dapat dilihat pada kerangka pikir sebagai berikut:



IAIN PALOPO

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan psikologis dan pendekatan paedagogis.

1. Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisa perilaku dan perbuatan manusia yang merupakan manifestasi dan gambaran dari jiwanya. Pendekatan ini digunakan karena salah satu aspek yang akan diteliti adalah remaja.

2. Pendekatan pedagogis yakni pendekatan yang digunakan untuk menganalisa objek penelitian dengan menggunakan tema-tema kependidikan yang relevan dengan pembahasan seperti peran pendidikan agama sebagai lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berbentuk deskriptif kualitatif yang menganalisis data secara mendalam tidak berdasarkan angka tentang Pendidikan Antikorupsi (Telaah Aspek Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) Atas Pendidikan Antikorupsi dan Implementasinya di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 14 responden yang terdiri dari seorang kepala sekolah dan 13 orang guru.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian secara leksikal berarti alat atau perkakas dalam melaksanakan penelitian.¹ Dengan demikian, dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi. Instrumen ini bertujuan untuk mendapatkan data yang dapat dipertanggung jawabkan tentang topik bahasan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan masalah yang telah dirumuskan, maka data yang dibutuhkan untuk dikumpulkan melalui prosedur tertentu guna mengetahui ada tidaknya relevansi antara unsur-unsur yang terdapat dalam sisi kehidupan dengan Korelasi Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Kecerdasan Emosional Siswa Di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

Dalam kegiatan penelitian ini, pengumpulan data diterapkan di lapangan memakai prosedural yang dianggap memiliki kriteria sebagai suatu riset memegang

¹Lukman Hakim, *Kamus Ilmiah Istilah Populer* (Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 1994), h. 171.

nilai keilmiahannya. Penggunaan prosedur dalam penelitian ini lebih disesuaikan dengan analisis kebutuhan dan kemampuan peneliti sendiri, tanpa maksud mengurangi prosedur yang berlaku.

1. Observasi, yaitu peneliti mengadakan studi awal sebelum penelitian resmi dilakukan, artinya peneliti mengadakan pengamatan terlebih dahulu guna mengetahui ada tidaknya data-data yang dapat berhubungan langsung atau tidak langsung berkenaan dengan hal-hal yang akan diangkat dalam pengkajian ini dengan mengedepankan masalah Korelasi Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Dengan Kecerdasan Emosional Siswa Di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.

2. Wawancara, yaitu peneliti mewawancarai secara langsung dengan kepala Sekolah, para guru dan murid yang berada di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Untuk memudahkan pelaksanaannya, wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara.

3. Dokumentasi, yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi.² Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dokumen-dokumen tersebut dapat membantu dalam memecahkan masalah-masalah dalam penelitian.

²*Ibid.*, 54.

E. Teknik Analisis Data

Dalam pengolahan data penulis menggunakan analisis non statistik. Dalam metode ini penulis hanya menganalisis data menurut isinya tidak mengelola data dengan angka-angka atau dengan data statistik. Kemudian hasilnya akan diuji melalui pengujian hipotesis pada akhir pembahasan ini. Dalam mengelolah data ini penulis menggunakan teknik analisis data menurut teori Seiddel dengan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Mencatat hasil yang diperoleh dalam penelitian lapangan, selanjutnya diberi kode dengan tujuan agar sumber data tersebut dapat ditelusuri dengan mudah.
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtiar, dan membuat indeksinya.
3. Berfikir, dengan tujuan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungannya, dan membuat temuan-temuan umum.³

Penulis sengaja memilih teknik ini karena sangat sesuai dengan lokasi dan kondisi tempat peneliti serta relevan dengan judul penelitian.

³Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

a. Sejarah Singkat

SDN 468 Bilante merupakan didirikan pada tahun 1984 dengan status sebagai kelas jauh dari SDN 05 Riwang dengan jarak $\pm 1,5$ Km dari jalan poros Palopo-Makassar. Dengan pertimbangan dari para tokoh masyarakat maka sekolah ini berhasil didirikan dengan tujuan memenuhi kebutuhan pendidikan khususnya di wilayah Bilante. Adapun tempat berdirinya lokasi ini merupakan hibah dari masyarakat setempat dengan bantuan dari pemerintah daerah sehingga sekolah ini berhasil didirikan dan sampai sekarang.¹

Demikianlah sekilas tentang sejarah berdirinya SDN 468 Bilante Kabupaten Luwu.

b. Visi dan Misi SDN 468 Bilante Kabupaten Luwu

1) Visi

Berdasarkan analisa internal dan eksternal di Sekolah Dasar Negeri 468 Bilante Kabupaten Luwu Maka ditetapkan visi yaitu “Mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan untuk menumbuhkan insan yang cerdas, beriman, dan bertaqwa,

¹Profil SDN 468 Bilante Kabupaten Luwu 2013/2014.

serta memiliki toleransi mandiri”. Dengan visi tersebut tentunya pihak sekolah berupaya menjadikan SD Negeri 468 Bilante sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan professional melalui total quality manajemen, kondusif dalam pembelajaran dengan budaya akademis, budaya religious serta kerjasama kemitraan dengan unsur dan elemen masyarakat sekitar.

2) Misi

Adapun misi SDN 468 Bilante adalah:

- (a) Menciptakan suasana sekolah yang kondusif
- (b) Menerapkan pembelajaran dengan pendekatan PAIKEM
- (c) Menanamkan nilai-nilai religi dan karakter melalui kegiatan pembiasaan
- (d) Membentuk pribadi yang sehat jasmani dan rohani
- (e) Melatih siswa dalam berbagai keterampilan hidup agar tercipta insan yang mandiri.²

c. Keadaan Guru

Pada umumnya guru merupakan salah satu komponen yang paling dominan dalam pelaksanaan perencanaan pengajaran di suatu lembaga pendidikan. Guru sebagai anggota dari masyarakat yang bersifat kompetensi dan mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas mengajar dalam rangka mentransfer nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik sebagai suatu jabatan profesional yang dilaksanakan atas dasar kode etik profesi yang di dalamnya tercakup suatu kedudukan fungsional yang

²Visi dan Misi Sekolah Dasar Negeri 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

dilaksanakan tugas/tanggung jawabnya sebagai pengajar, pemimpin dan sebagai orang tua.

Begitu pentingnya peranan guru, sehingga tidaklah mungkin mengabaikan eksistensinya. Seorang guru yang benar-benar menyadari profesi keguruannya, akan dapat menghantarkan peserta didik kepada tujuan kesempurnaan. Olehnya sangat penting suatu lembaga sekolah, senantiasa mengevaluasi dan mencermati perimbangan antara tenaga edukatif dan populasi keadaan siswa. Bila tidak berimbang maka akan mempengaruhi atau bahkan dapat menghambat proses pembelajaran. Selanjutnya bila proses pembelajaran tidak maksimal maka hasilnya pun tidak akan memuaskan.

Di samping itu guru juga merupakan komponen yang paling penting dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. Untuk lebih jelasnya keadaan guru di SDN 468 Bilante dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Keadaan Guru dan Tenaga Kependidikan SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014

no.	Nama Guru	Jenis Kelamin		Jabatan	Status
		L	P		
1	Hasnawati, S.Pd.		√	Kep.Sek	PNS
2	Ichsan, S.Pd.		√	Guru	PNS
3	Muslina Safar, S.Pd.		√	Guru	PNS
4	St. Rahmah, S.Pd.I.		√	Guru	PNS
5	Nur'Asma, a. Ma.		√	Guru	PNS

6	Widyanti, S.Pd.		√	Guru	PNS
7	Hasni, S.Pd.		√	Guru	PNS
8	Harliati, S.Ag.		√	Guru Agama	Honor
9	Humera, S.Pd.I.		√	Guru	Honor
10	Mawardi, S.Pd..	√		Guru	Honor
11	Wida Ani, S.Pd.		√	Guru	Honor
12	Yusnawati, A.Ma.		√	Guru	Honor
13	Hasnidar		√	Guru	Honor
14	Yunita, S.Pd.		√	Guru	Honor

Sumber Data : Kantor SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat dipahami bahwa jumlah guru pada SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014 telah cukup dengan melihat siswa yang ada. Dengan demikian SDN 468 Bilante masih memerlukan tenaga pengajar untuk melengkapi berbagai kekurangan yang ada di sekolah tersebut.

d. Keadaan Siswa

Sebagaimana halnya guru dalam sebuah lembaga pendidikan, keberadaan siswa pun sangat memegang peranan penting. Lancar dan macetnya sebuah sekolah, biasanya tampak dari keberadaan siswanya, kapasitas atau mutu siswa pada suatu lembaga pendidikan dengan sendirinya menggambarkan kualitas lembaga tersebut. Oleh karena itu, siswa yang merupakan bagian dan pelaku proses belajar mengajar, haruslah benar-benar mendapat perhatian khusus, supaya mereka dapat melaksanakan amanah sebagai generasi penerus agama dan bangsa secara sempurna.

Dalam teori perkembangan peserta didik, setiap anak didik mempunyai tugas perkembangan ke arah yang wajar. Baik fisik maupun mental pada priode-periode tertentu. Jika terjadi tugas perkembangan yang macet atau gagal pada satu priode, maka akan menyebabkan ketidakmampuan anak dalam menyesuaikan dirinya. Banyak sekali tugas-tugas perkembangan dari masa anak mulai lahir hingga dewasa. Karenanya sekolah mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid agar tugas-tugas perkembangan itu dapat terselesaikan dengan baik.

Siswa merupakan komponen yang paling dominan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, di mana siswa menjadi sasaran utama dari pelaksanaan pendidikan dan pengajaran. Oleh sebab itu, tujuan dari pendidikan dan pengajaran sangat ditentukan oleh bagaimana merubah sikap dan tingkah laku peserta didik ke arah kematangan kepribadiannya.

Jumlah siswa di sekolah ini sebanyak 57 siswa, terbagi atas 29 Putra dan 35 Putri. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Selain itu Untuk tahun ajaran 2013/2014 SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu berjumlah 90 orang siswa yang berasal dari wilayah setempat. Jumlah rombel yang ada di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu sebanyak 6 rombel. Untuk lebih jelasnya kondisi siswa SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Keadaan Siswa SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu
Tahun Ajaran 2013/2014

NO	Kelas	Jumlah Siswa		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	I	4	11	15
2	II	5	6	11
3	III	9	3	12
4	IV	10	3	13
5	V	11	4	15
6	VI	10	6	16
Jumlah		49	34	83

Sumber Data: Bagian Tata Usaha SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu 2013/2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah siswa SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014 masih sangat sedikit. Hal ini berarti siswa yang ada di sekolah tersebut masih belum mencapai standar. Hal ini dapat dimaklumi karena SDN 468 Bilante masih berstatus sekolah yang baru.

e. Keadaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksudkan adalah semua yang dapat dijadikan alat bantu belajar mengajar, baik langsung maupun tidak, yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yang berupa gedung dan semua perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan proses belajar mengajar di SDN 468 Bilante. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya pendidikan pada SDN 468 Bilante, maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Keadaan Sarana dan Prasarana SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keadaan	Ket.
1.	Ruang Belajar	3	Baik	
2.	Ruang Kantor	1	Baik	
3.	Ruang UKS	1	Baik	
4.	Masjid	1	Baik	
5.	WC/Toilet	2	Baik	
6.	Meja/Kursi	60 buah	Baik	
7.	Asrama Putra/Putri	2	Baik	
8.	Lapangan Sepak Bola	1	Baik	
9.	Lapangan Takraw	1	Baik	
10.	komputer	1	Baik	

Sumber Data : Kantor SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa keadaan gedung/bangunan yang ada di SDN 468 Bilante Tahun Ajaran 2013/2014, belum memadai, dan tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sehingga diperlukan kerja keras dalam membangun serta mengembangkan lembaga tersebut.

2. Penanaman Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

Ada beberapa materi yang disampaikan dalam pembelajaran PAI di sekolah guna menunjang penanaman nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik, materi-materi

tersebut diantaranya adalah: Nilai-nilai anti korupsi dalam akhlak menjadi salah satu motor penggerak penanaman nilai anti korupsi di sekolah, dalam materi akhlak peserta didik di beri pelajaran bagaimana bersikap dan bertindak laku dalam sehari-hari khususnya sifat-sifat terpuji seperti amanah (jujur), adil, qona'ah dll.³

Aqidah atau keimanan merupakan bagian dari upaya pendidik menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah, keimanan secara tidak langsung dapat membuat peserta didik dengan sendirinya akan berperilaku jujur, adil. Dan sebagainya.⁴ Sehingga peserta didik setelah mendapatkan materi tersebut bisa menanamkan dalam dirinya untuk berperilaku anti korupsi dalam sehari-hari.

Penanaman pendidikan antikorupsi yang dilaksanakan dalam pembelajaran PAI yang dilaksanakan di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu terdiri dari dua aspek yaitu penanaman yang dilakukan di dalam kelas dan penanaman yang dilakukan di luar kelas. Adapun pembahasannya sebagai berikut:

a. Pembelajaran di dalam kelas

Penanaman nilai antikorupsi di sekolah merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi sejak dini. Keberadaan mata pelajaran PAI dengan teorinya adalah usaha dari pihak sekolah dalam penanaman nilai anti korupsi di sekolah. Peserta didik menerima teori- teori di dalam kelas, baik teori

³Harliati, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2013

⁴Hasnawati, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 12 Desember 2013

tentang pembelajaran agama atau pembelajaran moral. Ada beberapa hal diperhatikan dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas, diantaranya :

1) Kurikulum

Dalam kurikulum pendidikan agama Islam SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, pendidikan anti korupsi sebenarnya belum menjadi materi inti atau sub pokok dalam mata pelajaran PAI. Akan tetapi, secara implisit nilai-nilai moral khusus untuk anti korupsi sub pokok pembahasan sifat-sifat terpuji (mulai dari kejujuran, syukur, adil, dll.), sudah menjadi konsumsi peserta didik saat proses belajar-mengajar mata pelajaran PAI dilaksanakan.

Upaya menanamkan nilai-nilai moral pun dalam kurikulum tidak harus dengan materi yang bersangkutan dalam hal ini kejujuran atau keadilan.

Seperti yang di ungkapkan Harliati

Di dalam kelas kita mencoba untuk simulasi nilai-nilai anti korupsi seperti jujur, adil dll. sehingga kita dapat mengetahui lebih jelas tentang korupsi, penyebab dan cara mengatasinya.⁵

Dari persoalan di atas, penanaman nilai-nilai moral di sekolah khususnya kejujuran/keadilan tidak lagi harus dengan materi kejujuran, semua materi mempunyai kesempatan yang sama untuk menerangkan dan menjelaskan sesuai dengan disiplin ilmu yang di ajarkan dengan menggunakan perspektif mata pelajaran masing-masing.

2) Guru

⁵Hasnawati, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 12 Desember 2013

Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang kerap kali berhadapan dengan peserta didik dalam proses pendidikan. Oleh karena guru merupakan tenaga kependidikan, maka guru pun bertanggungjawab atas terselenggaranya pembinaan kesiswaan di sekolah secara umum dan secara khusus terpadu dalam setiap mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, setiap guru sebagai pendidik seyogianya memahami, menguasai, dan menerapkan kompetensi bidang pembinaan kesiswaan. Profesionalisme sangat penting kaitannya dalam pembelajaran PAI terlebih dalam menanamkan nilai anti korupsi di sekolah, selain guru sebagai seorang pendidik harus bisa menjadi contoh bagi peserta didik. Di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ada 1 guru agama S.1 yang dianggap cukup karena guru fokus dengan mata pelajaran sesuai dengan kemampuannya.

Keteladanan dari seorang guru adalah kunci pokok peserta didik akan mengikuti apa yang kita nasihatkan. Di samping guru memberi nasihat kepada peserta didik guru harus mampu menjalankan apa yang di nasihatkan. Semisal, guru sering menyarankan peserta didik untuk saling tolong-menolong antar sesama. Seorang guru harus mampu membuktikan kepada peserta didik bahwa dia melaksanakan apa yang disarankan baik antar sesama guru atau terhadap peserta didik yang sedang membutuhkan pertolongan.

Seperti yang diungkapkan guru agama SDN 468 Bilante bahwa:

Dalam pemberian nilai ujian saya lebih apresiasi dengan peserta didik yang jujur tapi mendapatkan nilai pas-pasan dibanding peserta didik yang mendapat nilai

bagus tapi hasil contekan. Selain itu ada rasa puas di dalam hati ketika soal tugas atau ujian dikerjakan sendiri, apalagi kalau mendapat nilai bagus”.⁶

Disini terlihat seorang guru mencoba memberitahukan kepada peserta didik bahwasanya kejujuran sangatlah penting dalam kehidupan dan tidak akan merugikan diri sendiri.

3) Peserta didik

Peserta didik di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dituntut untuk melatih kesadarannya, ini terlihat ketika jam masuk kelas peserta didik mencari ruangan yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar sedangkan guru menunggu di dalam kelas, kemudian peserta didik melakukan absensi.⁷

Proses yang demikian, adalah bagian dari pada melatih peserta didik agar sadar, mandiri serta tanggung jawab dengan perannya sebagai peserta didik. Sehingga dalam setiap kali pembelajaran peserta didik tidak akan mengalami kejenuhan dengan suasana yang baru.

Proses pembelajaran moral di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu , terutama pendidikan anti korupsi dilakukan terhadap peserta didik. Proses ini dilakukan oleh guru agama kepada peserta didik. Di antara materi yang disampaikan dalam kelas, antara lain :

(a) Membiasakan perilaku terpuji

⁶Harliati, guru PAI SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 13 Desember 2013

⁷Humera, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 13 Desember 2013

Perilaku terpuji disini diharapkan peserta didik mampu untuk membiasakan berbuat sesuatu yang tidak merugikan dirinya dan orang lain. Semisal jujur, adil, *husnuddhon*, ikhlas, dan sebagainya

(b) Menghindari perilaku tercela

Disamping perilaku terpuji peserta didik harus mewaspadaai perilaku tercela, yang mana perilaku ini akan dapat mengakibatkan bahaya baik untuk dirinya maupun orang lain. Seperti ; riya', sombong, dan sebagainya

(c) Meneladani perilaku Rasulullah

Untuk memiliki akhlak yang mulia, peserta didik dianjurkan selain untuk mempelajari, memahami sifat-sifat rasulullah, peserta didik dianjurkan meneladani sifat-sifat rasulullah saw., yaitu ; sidiq, amanah, dan sebagainya., walaupun tidak harus sama sama.

(d) Menampilkan perilaku ikhlas

Dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dituntut untuk beribadah atau menjalankan syari'at dengan didasari keikhlasan. Dengan perilaku ikhlas orang tidak akan mudah terpancing untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain.

4) Media Pembelajaran

Media pembelajaran juga diperlukan dalam proses belajar mengajar. Dengan media, pesan yang terkandung dalam pembelajaran dituangkan dalam komunikasi verbal (kata-kata dan tulisan) dan non verbal (gambar visual). Media pembelajaran sangat bermanfaat agar penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar,

Pembelajaran dapat lebih menarik, meningkatkan interaktif siswa dalam menerapkan teori belajar, mempersingkat waktu pembelajaran dan kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Dalam proses pembelajaran PAI terdapat beberapa fasilitas sebagai penunjang pembelajaran PAI di sekolah sebagai upaya untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi di sekolah, diantaranya :

1) Kelas

Kelas salah satu bagian terpenting dalam pembelajaran peserta didik di SDN 468 Bilante terdapat 1 guru agama.

2) LCD

Dengan adanya LCD diharapkan guru dan peserta didik dapat melihat materi secara langsung dan bersamaan. Sehingga memudahkan pembelajaran yang ada di kelas.

3) Musholla

Musholla sebagai penunjang pembelajaran PAI di sekolah selain menjadi tempat ibadah musholla di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dijadikan sebagai kelas bagi peserta didik.

b. Pembelajaran di Luar Kelas

1) Kantin Kejujuran

Di dalam proses pembelajaran PAI peserta didik ditanamkan untuk jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain, ini terkait dengan sifat-sifat terpuji yang harus dilaksanakan peserta didik yang notabene diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial.

Penanaman nilai anti korupsi bukan hanya dilaksanakan pada saat pembelajaran PAI, akan tetapi sudah merambah ke lingkungan sekolah. Selain di kelas kantin adalah tempat yang paling representatif untuk mengetahui sejauh mana kejujuran peserta didik di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu. Di kantin ini peserta didik ditanamkan untuk jujur pada diri sendiri dan jujur pada orang lain, diantaranya pada saat makan peserta didik diberi kebebasan mengambil sendiri jajan dan makanan dan sejenisnya tanpa dilayani.

Di kantin kejujuran SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu misalnya, peserta didik pada saat jajan diberi kebebasan untuk mengambil sendiri makanan yang diinginkan kemudian membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan pengelola kantin. Penjual (pengelola katin) tidak mengawasi berapa jajanan yang di ambil atau yang di makan, semua dilakukan sendiri oleh siswa (mengambil sendiri, menghitung sendiri, membayar dan mengambil kembalian sendiri).⁸

Seperti yang di katakan sampaikan peserta didik :

Di kantin ini peserta didik membayar sesuai dengan apa yang dia ambil, dan sudah disediakan 2 kotak satu untuk pembayaran dan satunya lagi untuk pengembalian. Misalnya saya beli jajan harganya Rp 500 dan saya membawa uang Rp 1000, saya tinggal masukkan uang saya pada kotak pembayaran dan

⁸Muslina Safar, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 14 Desember 2013

ambil uang di kotak pengembalian. Pada saat evaluasi hasilnya lumayan bagus walaupun kadang – kadang untung kadang-kadang rugi ”⁹

Pernah ada kasus seperti disampaikan salah seorang pengelola kantin :

“Bahkan ada juga yang sudah makan dan lupa bayar tapi ketika ia ingat pada saat perjalanan pulang, kebalikan lagi ke sini bersama orang tuanya untuk membayar makanan itu, maaf bu, saya baru ingat waktu mau pulang jadi kembali lagi kesini walaupun tidak ada ukuran yang jelas dengan adanya kantin kejujuran ini sudah memberikan bukti siswa di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu membiasakan diri dengan sifat kejujuran”.¹⁰

a. Keluarga

Sekolah meminta peran keluarga lebih bisa meluangkan waktunya untuk mendampingi anaknya. Hal ini berdasarkan waktu yang relatif sedikit dimiliki guru, khususnya guru agama. Sehingga tidak bisa mengontrol dan mengawasi langsung peserta didik setelah pulang dari sekolah.

Hasnawati selaku kepala sekolah mengungkapkan bahwa:

Selaku pendidik yang waktunya sangat terbatas, kami selalu mengharapkan agar keluarga serius memperhatikan pendidikan anaknya, terutama berkaitan dengan pendidikan agama. Anak akan berhasil jika didukung oleh pembelajaran di rumah yang dilakukan oleh keluarga demikian pula sebaliknya jika pendidikan anak di rumah tidak diperhatikan maka para guru/pendidik di sekolah akan kewalahan mengatasi keterlambatan pembelajaran anak tersebut.¹¹

Berkaitan dengan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa memang keluarga merupakan salah satu kunci utama pendidikan anak. Dengan perhatian dan

⁹Riska, siswa SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 14 Desember 2013

¹⁰Rosmiati, Penjaga Kantin SD Negeri 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 13 Desember 2013

¹¹Hasnawati, Kepala Sekolah SD Negeri 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 14 Desember 2013.

pendampingan yang penuh dari keluarga, anak terbiasa baik di rumah, di sekolah pun tidak ada masalah yang berarti. Upaya melibatkan peran orang tua ini dilakukan jika ada kasus peserta didik yang nakal.

3. Kendala dan Solusi Implementasi Penanaman Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu

a. Kendala yang dihadapi

Dalam menerapkan penanaman nilai-nilai pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu memiliki beberapa kendala yaitu diantaranya:

1) Pembelajaran di Dalam Kelas

(a) Kurikulum

Kurikulum adalah bagian terpenting dalam pembelajaran yang menjadi landasan berpijak setiap kali melakukan proses belajar mengajar akan tetapi dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi di sekolah terdapat persoalan terkait dengan kurikulum, diantaranya : *pertama*, materi PAI terlalu banyak sehingga murid belum bisa memahami, dan melaksanakan ilmu secara maksimal. *Kedua*, materi yang disuguhkan belum mengkhususkan pada pendidikan anti korupsi, sehingga pembahasan dan persoalan yang terkait dengan korupsi tidak seutuhnya.¹²

¹²Harliati, guru PAI SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 13 Desember 2013

(b)Guru

Proses pembelajaran PAI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu khususnya nilai- nilai antikorupsi yang dilakukan di dalam kelas adalah bagian dari usaha sekolah menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi yang akan datang. Akan tetapi ada beberapa persoalan ketika ini dilakukan oleh guru agama saja, dengan jumlah jam yang hanya sembilan puluh menit dalam satu minggu, menjadi kesulitan tersendiri bagi pelaksanaan penanaman nilai antikorupsi. Selain itu, antara guru dan peserta didik terkadang menjadi hambatan tersendiri ketika keduanya sudah keluar dari lingkungan sekolah, ini menyebabkan guru tidak mampu mengontrol dan mengawasi peserta didik dengan maksimal.¹³

(c)Peserta didik

Keberadaan peserta didik sangat penting guna menunjang suksesnya gerakan anti korupsi di sekolah, namun ada beberapa catatan yang membuat peserta didik sulit atau bahkan tidak menanamkan nilai anti korupsi dalam keseharian-nya, yaitu *pertama* waktu yang relatif sedikit di sekolah menjadikan peserta didik tidak maksimal dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. *Kedua*, lingkungan yang salah akan menjadikan peserta didik rawan dengan situasi dan kondisi yang fatal bagi

¹³Harliati, guru PAI SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 13 Desember 2013

proses kehidupannya, *ketiga* konflik keluarga sangat berpengaruh terhadap psikologis bagi peserta didik saat di sekolah.¹⁴

(d) Manajemen Kelas

Dari sisi manajemen, memang sudah ada pembagian terkait dengan kelas akan tetapi dengan banyaknya peserta didik dengan hanya 2 kelas agama sehingga sering terjadi benturan jam pelajaran yang menyebabkan peserta didik dan guru mencari tempat terdahulu sebelum melaksanakan proses belajar mengajar.¹⁵

2) Pembelajaran di Luar Kelas

(a) Kantin Kejujuran

Dalam pelaksanaan kantin kejujuran SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu bukan berarti tanpa kendala, dibutuhkan pengelolaan yang lebih baik dan profesional untuk mencapai hasil maksimal. Banyak yang harus dibenahi dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai anti korupsi di kantin kejujuran SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, mulai dari Manajemen pengelolaan, pengawasan dan kurang lengkapnya sarana prasarana kantin itu sendiri, sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal dalam pengelolaan baik untuk sekolah, pengelola maupun peserta didik sendiri

(b) Peran Keluarga

¹⁴Hasnawati, Kepala Sekolah SD Negeri 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 14 Desember 2013.

¹⁵Harliati, guru PAI SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 13 Desember 2013

Keluarga dari peserta didik kebanyakan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang notabene merupakan orang yang sibuk dengan pekerjaannya. Ini menyebabkan peserta didik kurang mendapatkan perhatian yang serius dari keluarganya, sehingga banyak anak yang lepas dari peran dan tanggung jawab keluarga. Mereka hidup dengan dunia yang sekiranya dapat membuat peserta didik tersebut santai walaupun sebenarnya lingkungan masyarakat ada yang baik dan adapula yang buruk. Oleh karena itu, keluarga harus bisa kerjasama dengan semua pihak baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat untuk menciptakan generasi yang anti korupsi.

b. Solusi yang pemecahan

Generasi yang anti korupsi adalah tujuan daripada penanaman nilai anti korupsi di sekolah, agar penanaman nilai anti korupsi dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan profesionalisme guru serta pengelolaan yang baik dan optimal segala fasilitas yang menunjang penanaman nilai anti korupsi, khususnya kantin kejujuran.

Penanaman nilai agama, yang termasuk di dalamnya nilai anti korupsi, tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. Guru-guru mata pelajaran lain hendaknya dilibatkan secara aktif dalam menanamkan nilai tersebut. Keterlibatan potensi-potensi yang lain juga perlu diikutsertakan, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian juga mengenai peran keteladanan, semua guru bahkan semua potensi yang ada di sekolah seharusnya bisa dijadikan panutan oleh peserta didik. Pendidik atau guru harus bisa menjadi *uswatun hasanah* bagi peserta didik, karena mau tidak mau guru akan menjadi panutan peserta didik secara langsung maupun tidak langsung. Jangan disalahkan ketika peserta didik melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik/buruk ketika gurunya sendiri masih melakukan hal yang serupa. Guru selain menjadi pendidik harus bisa menjadi orang tua, sahabat dan teman bagi peserta didik, sehingga peserta

merasa nyaman saat, diskusi, curhat atau sharing baik persoalan sekolah, keluarga maupun pribadi.¹⁶

Berkaitan dengan mengelola kelas guru harus Pertama memiliki kemampuan untuk menata ruang kelas sebagai tempat berlangsungnya aktifitas pembelajaran. Kedua mampu menciptakan iklim pembelajaran berdasarkan hubungan manusiawi yang harmonis. Dalam perannya sebagai pengelola kelas guru hendaknya mampu mengelola kelas dapat menjadi lingkungan yang baik untuk melakukan kegiatan pembelajaran.

Lingkungan kelas yang baik untuk belajar ialah bersifat menantang dan merangsang anak untuk belajar, serta memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan kemampuan guru dalam menciptakan iklim pembelajaran berdasarkan hubungan manusiawi berkaitan dengan bagaimana guru menampilkan peran sebagai orang dewasa yang profesional sehingga penampilannya menyenangkan bagi peserta didik.

Persoalan kurikulum yang diajarkannya pun perlu adanya evaluasi, materi PAI mulai dari kelas I sampai VI di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu terlalu banyak sehingga murid belum bisa menangkap ilmu secara maksimal, kemudian materi yang di suguhkan belum mengkhususkan pada pendidikan anti korupsi, sehingga pembahasan dan persoalan yang terkait dengan korupsi tidak seutuhnya. Oleh karena itu, materi khusus pendidikan anti korupsi harus

¹⁶Hasnawati, Kepala Sekolah SD Negeri 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, *wawancara* pada tanggal 14 Desember 2013.

direalisasikan walaupun tidak menjadi mata pelajaran baru dapat juga dijadikan sebagai integrat kurikulum sehingga peserta didik dapat memahami secara detail tentang korupsi itu sendiri.

Perilaku mengganggu aktifitas dalam pembelajaran yang dimunculkan peserta didik perlu dipahami oleh seorang guru sebagai orang dewasa yang profesional. Di samping itu, guru harus menyadari keunikan dari peserta didik yang berangkat dari basic yang berbeda sehingga memunculkan perilaku yang berbeda pula. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menjadi teman, sahabat sekaligus orang tua bagi peserta didik tersebut agar dapat mengontrol emosi yang muncul dalam sesaat dari peserta didik. SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dalam pengelolaan kantin sekiranya perlu membentuk atau memberi kewenangan bidang yang sudah ada yang bertanggung jawab mengadakan koordinasi dan komunikasi secara langsung kepada pihak pengelola kantin. Hal ini agar komunikasi antara pengelola kantin dan sekolah berjalan lancar.

Demikian juga, kesan lepas tangan begitu saja atau lepas tanggung jawab tidak akan dituduhkan kepada lembaga-lembaga tersebut. Bentuk perhatian lain yang mungkin dilakukan lembaga-lembaga adalah berupa memberikan bantuan pengembangan kapasitas pengelolaan kantin kejujuran, baik kepada pihak pengelola kantin maupun pihak sekolah, berupa bantuan fasilitas atau penambahan modal. Bantuan tersebut sangat menunjang peningkatan kualitas pelayanan kantin kepada para peserta didik. Sekolah juga perlu melibatkan peran keluarga, dalam hal ini orang tua peserta didik untuk membantu merealisasikan penanaman nilai agama di

lingkungan keluarga mereka. Untuk mengatasi hal itu, sekolah perlu memanfaatkan kesempatan ketika para orang tua peserta didik dapat hadir di sekolah, seperti di awal atau akhir setiap tahun pelajaran. Karena, bagaimanapun program ini tidak hanya dimaksudkan untuk terlaksana di sekolah saja. Akan tetapi penanaman nilai ini bertujuan membekali peserta didik agar menjadi manusia yang jujur, manusia yang anti korupsi

B. Pembahasan

Penanaman nilai dapat diartikan sebagai wujud aplikasi dari apa yang diperoleh dari pendidikan yang kemudian ditransformasikan secara sadar ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Penanaman nilai yang dimaksud dalam hal ini adalah mendorong lahirnya generasi yang mampu memperbaharui sistem nilai yang sedang berjalan dan melawan beberapa arus yang kini mulai menggerogoti budaya bangsa, khususnya korupsi.

Bangsa Indonesia akhir-akhir ini tengah menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik seputar krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah problematika korupsi yang tak kunjung usai. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya dan epidemi bahkan virus yang harus segera diperangi bersama.

Fenomena korupsi yang sudah membudaya bagi masyarakat Indonesia, ditambah akhir-akhir ini banyak generasi yang hanya "gandrung" akan budaya pragmatis, hedonis, dll., yang menyebabkan carut marutnya pemerintahan, berbanding terbalik jika dilihat dari struktur masyarakat kita, mestinya korupsi sulit masuk di negara kita yang notabene disebut bangsa yang religius, artinya bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan.

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap antikorupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Sehingga dalam pembelajaran, peserta didik tidak hanya di tekankan pada aspek kognitif saja dan pendidikan agama Islam harus dikembangkan ke arah internalisasi nilai (afektif) yang tentunya diimbangi dengan aspek kognitif, sehingga peserta didik timbul dorongan yang kuat untuk mengamalkan ajaran dan nilai-nilai dasar agama yang telah terinternalisasikan dalam diri peserta didik.

Banyak kalangan yang mempertanyakan keberhasilan pendidikan agama di sekolah. Hal ini dikarenakan beberapa alasan: (1) rendahnya minat dan kemauan untuk belajar agama, (2) rendahnya kesadaran mengamalkan ibadah, (3) rendahnya kemampuan baca tulis al-Quran, (4) berperilaku bertentangan dengan ajaran agama yang dianut seperti melakukan tindak kriminal, anarkhis, premanisme, perkelahian antar pelajar, konsumsi minuman keras, narkoba, dan lain-lain, (5) masih meluasnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di semua sektor kemasyarakatan. Bahkan terjadinya krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia sesungguhnya berpangkal pada krisis akhlak atau moral.

Krisis ini oleh sementara pihak dianggap sebagai kegagalan pendidikan agama. Kalau kita menilik pada sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Nilai-nilai tersebut mengharuskan adanya usaha sungguh-sungguh untuk memberikan pendidikan agama yang sebaik-baiknya kepada generasi muda. Sasaran yang ingin dicapai bukan hanya lahirnya anak Indonesia yang sekedar kuat penalarannya dan sehat jasmaninya, tetapi manusia utuh yang kuat pribadinya dan berakhlak mulia.

Tujuan ini akan dapat tercapai jika pendidikan agama dapat diberikan secara tepat dan benar. Oleh karena itu, penghayatan dan pengamalan ajaran agama menjadi

tuntutan serius, dan sekaligus menjadi ukuran berhasil atau tidaknya praktek pendidikan agama.

Dengan demikian, Penanaman nilai antikorupsi tentu sangat relevan sebagai upaya edukatif mendidik generasi muda yang berkarakter jujur dan bermoral baik. Tujuan pokoknya, mencegah berlanjutnya siklus korupsi di masa mendatang. Asumsinya, peserta didik yang menjadi sasaran program tersebut merupakan generasi masa depan yang diharapkan tidak meneruskan kebiasaan korupsi.

Implementasi penanaman nilai di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu , terutama penanaman nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati. Beberapa hal tersebut sesuai hasil observasi antara lain:

1. Pembelajaran di kelas

Penyelenggaraan pendidikan salah satunya melalui jalur pendidikan formal, yaitu sekolah. Sekolah merupakan tempat belajar yang diselenggarakan melalui prasarana yang di lembagakan. Sekolah sebagai organisasi kerja terdiri dari beberapa kelas, baik yang bersifat paralel maupun berjenjang. Setiap kelas merupakan unit kerja yang berdiri sendiri dan berkedudukan sebagai sub sistem yang menjadi bagian dari sebuah sekolah sebagai total sistem. Pengembangan sekolah sebagai total sistem atau satu kesatuan organisasi sangat tergantung pada penyelenggaraan dan pengelolaan kelas, baik lingkungan masing-masing sebagai unit kerja yang berdiri sendiri maupun dalam hubungan kerja antara kelas yang satu dengan yang lain.

Tugas guru dalam kelas adalah membelajarkan siswa dengan menciptakan kondisi belajar yang optimal, kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru dapat mengatur siswa. Sarana pelajaran serta mengendalikannya dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pelajarannya.

Dalam usaha pencapaian tujuan belajar perlu diciptakan adanya lingkungan (kondisi) belajar yang kondusif. Kondisi belajar tersebut dipengaruhi oleh berbagai komponen yang saling mempengaruhi, komponen-komponen itu misalnya tujuan pembelajaran, materi yang akan diajarkan guru, siswa, jenis kegiatan yang dilakukan serta sarana belajar mengajar yang tersedia.

Dengan demikian untuk menciptakan situasi yang kondusif demi untuk memperoleh hasil yang efektif dalam proses belajar mengajar tidaklah cukup ditunjang oleh penguasaan materi saja, tetapi guru juga harus mempunyai keterampilan dasar yang diharapkan akan dapat membantu dalam menjalankan tugas dalam interaksi edukatif. Keterampilan mengajar merupakan faktor dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk meningkatkan mutu pengajaran, di antaranya adalah keterampilan pengelolaan kelas yang penting diperhatikan oleh seorang guru dalam menghadapi murid atau anak didiknya.

Penanaman nilai terutama nilai anti korupsi melalui proses pembelajaran di kelas di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, sebagian besar dilakukan oleh guru agama. Diantara materi yang disampaikan pada proses pembelajaran di kelas adalah membiasakan sifat-sifat terpuji, meneladani perilaku Nabi saw., menghindari sifat-sifat tercela, membiasakan perilaku ikhlas.¹⁷

¹⁷Harliati, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 17 Desember 2013

Namun, tata nilai religius yang dilembagakan di sekolah idealnya mampu membentuk sikap dan perilaku individu warga, sekolah yang religious pula. Selanjutnya aktualisasi nilai religius mampu memproduksi masyarakat sekolah yang religius.

Guru agama merupakan motor penggerak pendidikan agama, karena dia adalah pribadi berakhlak yang dicerminkan dalam dirinya dengan disiplin tinggi, berwibawa, cerdas, gemar belajar, menguasai metode dan memiliki kepemimpinan. Dia harus tekun bekerja memeriksa semua penugasan kepada murid, sekaligus memberikan bimbingan, teguran. Dan anksi karena guru agama yang hanya datang untuk mengajar, tidak memiliki ikatan emosional dengan siswanya, tidak berwibawa, adalah awal kegagalan pendidikan agama di sekolah.

Walaupun demikian, guru seorang agama tidaklah mempunyai cukup kesempatan untuk mendampingi peserta didik secara maksimal. Pada prakteknya, tugas mengajar yang dibebankan kepada seorang, guru agama secara umum hanya sembilan puluh menit. Waktu yang tersedia tidaklah cukup bagi guru agama untuk mengajarkan pelajaran agama sekaligus menanamkan nilai kepada para peserta didik.

Oleh karena itu, pembelajaran nilai agama sebenarnya tidak hanya harus dilaksanakan oleh guru yang mengajarkan mata pelajaran tertentu, yang dalam hal ini guru agama. Pembelajaran tersebut idealnya dilakukan bersamaan dengan diajarkannya berbaai mata pelajaran di sekolah, karena masing-masing mata pelajaran juga mengandung nilai-nilai tertentu yang terkait, baik secara langsung maupun tidak, dengan agama.

Pendidikan agama hendaknya dapat mewarnai kepribadian anak, sehingga agama itu benar-benar menjadi bagian dari pribadinya yang akan menjadi pengendali dalam hidupnya di kemudian hari. Untuk tujuan pembinaan pribadian itu, maka hendaknya diberikan oleh guru yang benar-benar tercermin agama itu dalam sikap, tingkah laku, gerak-gerik, cara berpakaian, cara berbicara, cara menghadapi persoalan dan dalam keseluruhan pribadinya.

Dari sini jelas bahwa sebenarnya dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mengandung nilai-nilai yang dapat mencegah merebaknya budaya korupsi. Dengan demikian, upaya pembinaan nilai idealnya bukan hanya menjadi tanggung jawab dari guru pendidikan agama saja, tetapi para guru dan tenaga kependidikan lainnya juga ikut bertanggung jawab melalui upaya pembinaan nilai sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Pembelajaran di luar kelas

Proses pembelajaran yang menyenangkan adalah cara terbaik untuk mengajak anak didik belajar lebih baik. Proses pembelajaran itu bias dilakukan lewat sebuah permainan yang mendidik atau praktik langsung di lapangan dan dapat diterapkan pada hampir semua mata pelajaran. Bahkan, bukan tidak mungkin kita bisa menggabungkan dua mata pelajaran sekaligus dalam suatu pembelajaran. Misalnya antar pelajaran PAI dan Penjaskes. Misalkan saja pengamatan terhadap gerakan sholat. Dari sisi PAI bisa dipelajari mengenai syarat dan rukunnya sholat sedangkan dari sisi penjaskes di setiap gerakan sholat mengandung makna kesehatan bagi anggota tubuh. Selain mengadakan pembelajaran rutin di dalam kelas (*classical*

class), tak terkecuali pembelajaran di luar kelas (*outdoor class*) sering dilakukan oleh siswa SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu dengan dibimbing oleh guru.

Seperti yang diungkapkan seorang guru : “Kami sering melakukan jam kelas di mushollah, selain memperoleh suasana baru peserta didik juga dapat mempraktikkan teori yang dipelajari di dalam kelas seperti berwudlu, sholat.”¹⁸

Peserta didik terlihat antusias dan asyik dalam melakukan tugas pengamatan dan mempraktikkan yang harus mereka lakukan, sementara guru dapat memberikan arahan dan bimbingan. Perlu disiapkan sebaik-baiknya dalam menyelenggarakan *outdoor class* ini agar proses belajar mengajar nantinya bisa berjalan lancar, efektif, efisien dan tujuan pembelajaran tercapai sempurna.

Sedangkan, di kantin kejujuran SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu ini para siswa ditanamkan untuk jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain serta memiliki kesadaran akan sesama. Melatih kejujuran dan Kesadaran peserta didik ini terlihat pada aktifitas yang terjadi sehari-hari di kantin

Dari beberapa kasus tersebut memang bisa diasumsikan bahwa kejujuran dan kesadaran peserta didik sudah terlatih, tapi ketika menghadapi kasus-kasus "kenakalan" tertentu, pengelola tidak memiliki cara yang tepat untuk mengatasinya. Karena pengelola tidak mempunyai cara untuk mengetahui secara pasti dan untuk mengatasi problem tersebut, maka pengelola pun tidak melaporkan problem itu ke

¹⁸Harliati, guru SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, wawancara pada tanggal 17 Desember 2013

pihak sekolah. Begitu juga, sekolah tetap memegang asumsinya bahwa perjalanan kantin kejujuran masih baik-baik saja, karena selama ini tidak ada keluhan atau laporan dari para pengelola kantin. Dengan demikian, semua potensi yang ada di sekolah dapat bersinergi bersama dalam mendukung keberhasilan penanaman nilai agama, terutama nilai anti korupsi di SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu melalui pembelajaran pendidikan agama Islam.



IAIN PALOPO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka penulis menetapkan beberapa kesimpulan:

1. Penanaman nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI, meliputi: *Pertama*: pembelajaran kelas, penanaman nilai ini terutama dilakukan oleh guru agama. Materi-materi yang disampaikan di antaranya membiasakan sifat-sifat terpuji (jujur, adil, Qona'ah, dll), mencontoh kejujuran Nabi Saw., menghindari memakan yang haram, membudayakan rasa malu, dan menjaga nama baik keluarga; *Kedua*, Keteladanan. Di samping memberikan nasehat kepada peserta didik, guru juga melaksanakan apa yang sudah dinasehatkan. *Ketiga*, Kejujuran. Peserta didik ditanamkan untuk jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Bentuknya adalah dengan memberikan peluang peserta didik untuk melakukan aktifitas sehari-hari dengan menjunjung tinggi kejujuran, seperti halnya di kantin SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu, semua dilakukan oleh peserta didik, dia mengambil sendiri, menghitung sendiri, membayar dan mengambil pengembalian sendiri tanpa dilayani pengelola kantin, kecuali mereka menginginkan untuk dilayani; *Keempat*, Kesadaran. Upaya menumbuhkan kesadaran peserta didik ini dilakukan dengan cara memberikan toleransi kepada mereka untuk membayar setelah makan atau tidak membayar pada saat itu. Mereka diperbolehkan membayar satu atau dua hari berikutnya

2. Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai anti korupsi melalui kantin kejujuran adalah: *Pertama*, Pelaksana atau Guru. Proses pembelajaran akhlak di

SDN 468 Bilante Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu yang hanya dilakukan oleh guru agama berlangsung kurang maksimal. Dengan jumlah jam tatap muka yang hanya sembilan puluh menit dalam satu minggu menjadi kesulitan tersendiri bagi pelaksanaan penanaman nilai anti korupsi.

Kedua, Pembinaan peserta didik, peserta didik merupakan generasi bangsa yang diharapkan memiliki semangat anti korupsi dikemudian hari sebagai bekal menjadi manusia yang beradab, namun ada beberapa catatan yang membuat peserta didik sulit atau bahkan tidak menanamkan nilai anti korupsi dalam kesehariannya, yaitu : (1) Jumlah peserta didik dengan yang banyak dengan karakter dan lingkungan berbeda. (2) Waktu yang relatif sedikit di sekolah menjadikan peserta didik tidak maksimal dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. (3) Lingkungan yang salah akan menjadikan peserta didik rawan dengan situasi dan kondisi yang fatal bagi proses kehidupannya. (4) Konflik keluarga sangat berpengaruh terhadap psikologis bagi peserta didik saat di sekolah.

Ketiga, Pengelolaan kantin. Sistem pengelolaan kantin kejujuran tidak secara langsung dilaksanakan oleh pihak sekolah, tapi dilaksanakan oleh penyewa. Karena secara struktural kantin tidak ada hubungannya dengan sekolah, maka komunikasi antara pihak sekolah dengan pengelola kantin pun kurang maksimal.

Keempat, Keluarga. Meskipun hanya sebagian peserta didik yang mempunyai kategori nakal, namun ini merupakan problem bagi berjalannya proses penanaman nilai. Beberapa anak yang nakal biasanya berasal dari keluarga yang mempunyai banyak kesibukan sehingga tidak mempunyai cukup waktu untuk mendampingi putra putri mereka. Pelaksanaan penanaman nilai anti korupsi melalui pembelajaran PAI

dirasa masih belum cukup efektif karena masih ada anak yang melakukan tindakan asusila tersebut.

Untuk membantu efektifitas penanaman nilai tersebut dilakukan beberapa langkah: *Pertama*, Profesionalisme guru, guru harus mampu membedakan mana kepentingan pribadi mana kepentingan umum, seorang guru harus dapat menjadi uswatun hasanah bagi peserta didik, selain itu guru harus bisa menjadi sahabat, teman dan bapak bagi peserta didik. Ini dimaksudkan agar peserta didik akan berbuat yang lebih baik sesuai dengan apa yang telah di nasehatkan atau di ajarkan oleh guru. *Kedua*, pembinaan peserta didik. Ini dilakukan jika terjadi kasuskasus tertentu yang memerlukan penanganan. *Ketiga*. pengelolaan kantin,

B. Saran-saran

Penulis akan mengemukakan saran yang kiranya dapat berguna yaitu:

1. Dalam proses penanaman nilai agama, yang termasuk di dalamnya nilai nti korupsi, hendaknya tidak hanya menjadi tanggung jawab guru agama saja. Keterlibatan semua guru mata pelajaran dan potensi-potensi yang lain juga perlu diikutsertakan, tentunya sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta mengoptimalkan peran keluarga sebab keluarga merupakan kunci utama pendidikan anak.

2. Pihak sekolah baik kepala sekolah, pendidik, pegawai, karyawan harus menjadi teladan bagi peserta didik dalam tindak lakunya, khususnya saat di lingkungan sekolah, dan bisa menjadi orang tua sekaligus sahabat bagi peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, *Idiologi Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006.
- Alatas, Syed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3ES, 1975.
- Arikunto, Suhasimi. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Cet. IV; Jakarta: Bina Aksara, 1988.
- Azhar, Muhammad. *Pendidikan Antikorupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, 2003.
- Dalyono, M. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta; Rineke Cipta, 1997.
- Daradjat, Zakiah, dkk. *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 197.
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan islam dalam Sistem pendidikan nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Jumanatul 'Aly, 2005.
- E, Mulyasa. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Fawa'id. Ahmad, Sultonul Huda. *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqih*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2006.
- Hakim, Lukman. *Kamus Ilmiah Istilah Populer*. Cet. I; Surabaya: Terbit Terang, 1994.
- Helmanita, Harlina. Chaider S Bamualim, Indonesia, JM Muslimin, *Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi Islam*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarifhidayatullah, 2006.
- Ilyas, Yunahar. *Korupsi Dalam Perspektif Agama-agama* (Panduan Untuk Pemuka Umat). Yogyakarta: KUTUB, 2001.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Mengenal Dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK, 2005.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXIX; PT. Remaja Rosdakarya, 2011.

- Nasir, Ridwan. *Dialektika Islam dengan Problem Kontemporer*. Jakarta: IAIN Press & LKiS, 2006.
- Nubowo, Andar. *Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pendidikan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian & Pengembangan Pendidikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004.
- Poerbawakatja, Soegarda. *Ensiklopedia Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Sagala. Syaiful. *Konsep dan makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta, 2008. Sujana, *Metodik Statistik*. Cet. V ; Bandung : PN. Tarsito, 1993.
- Sumanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Cet. I; Yogyakarta: Andi Offset, 1995.
- Subandiah. *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sudarwan, Danim. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*. Bandung; PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Soetopo, Hendayat dan Wast Soenanto, *Pembinaan Dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumiaksara, 1993.
- Yusuf, Moh. Asror. *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- Sumber dari Internet:
- [www. Bentuk-bentuk korupsi/kpk/Indonesia/.com](http://www.Bentuk-bentuk_korupsi/kpk/Indonesia/.com) diakses pada tanggal 14 Maret 2013.
- www.depdiknas.go.id. Diakses pada tanggal 14 Maret 2013.